

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE TIONGKOK**



AINUN AZIZAH

F0219331

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE
TIONGKOK**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Hubungan Internasional*

AINUN AZIZAH

F0219331

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN
DIPLOMATIK KEPULAUAN SOLOMON DARI
TAIWAN KE TIONGKOK

NAMA : AINUN AZIZAH

NIM : F0219331

PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 14 Oktober 2024

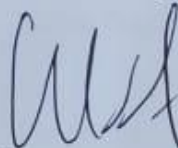
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A.
NIP. 198807132015042005

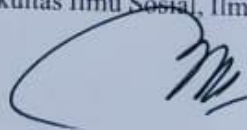
Pembimbing II



Wandu Abbas, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0013039005

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. H. Burhanuddin, M.Si.
NIP. 19620919 198903 1 004

SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE TIONGKOK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

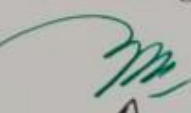


Ainun Azizah

F0219331

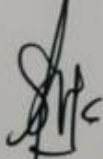
Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 24 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji:

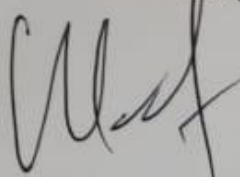
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Burhanuddin M.Si	Ketua Penguji	
2. Dr. Riady Ibnu Khaldun M.A BA. IR	Penguji Utama	
3. Dr. Abdul Hafid, S.S., M.Hum	Penguji Anggota	

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A.
NIP. 198807132015042005

Pembimbing II



Wandi Abbas, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0013039005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Azizah

NIM : F0219331

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar Kerjasama yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 21 Oktober 2024



Ainun Azizah

KATA PENGANTAR

Pertama-tama mari kita panjatkan puji Syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata' ala* yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam penggarapan skripsi ini. Sholawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad *Shalallahu' alaihi wassalam*, nabi yang menjadi panutan dan membawa kita dari alam gelap gulita kea lam yang diberkahi petunjuk agama dan ilmu pengetahuan. Skripsi berjudul '*Analisis Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok*' ini berhasil rampung sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Strata Satu pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat.

Ucapan terimakasih setulus-tulusnya kami berikan kepada keluarga besar di Masamba ataupun Wajo yang menemani penulis dalam setiap jenjang Pendidikan hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi anugerah terbaik yang mendampingi dalam setiap langkah dengan penuh kesabaran.

Penghargaan terbesar peneliti berikan kepada kedua dosen pembimbing yang menemani dan membantu dalam pengarapan skripsi ini. Kepada pembimbing I Asma Amin, S.IP., M.A dan pembimbing II Wandu Abbas, S.IP., M.Hub.Int serta ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Darlis dan Syarifah yang selalu mendoakan, mendukung, meberikan kebebasan dan kepercayaan kepada saya dengan sepenuh hati sehingga saya dapat menyelesaikan studi walaupun masa studi saya tidak secepat orang-orang di luar sana. Untuk saudara laki-laki

dan saudari-saudari Perempuan tercinta dan tersayang saya, yang telah mengajari berbagai hal, kalian adalah motivator disegala aspek kehidupan, baik itu tugas kuliah, keuangan dan kebutuhan lainnya. Terima kasih juga kepada ponakan dan sepupu-sepupu saya yang selalu tanya kapan selesai dan selalu menghibur jika saya pulang ke kampung.

2. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si**, selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat.
3. Terima kasih kepada **Dr. Burhanuddin, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.
4. Terima kasih kepada **Andi Ismira S. IP., M.A** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
5. Terima kasih kepada **Dr. Riady Ibnu Khaldun** selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu penuh semangat dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada **Asma Amin, S.IP., M.A** Selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, masukan dan arahnya terhadap skripsi ini. Ide-ide dan koreksinya sangat bermanfaat untuk skripsi penulis..
7. Terima kasih kepada bapak **Wandi Abbas, S.IP ., M.Hub.Int** Selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, masukan dan arahnya terhadap skripsi ini. Ide-ide dan koreksinya sangat bermanfaat untuk skripsi penulis
8. Terima kasih kepada **Staf FISIPHUM, Ibu Anti** yang selalu setia dan

senantiasa membantu penulis dalam mengurus administrasi kuliah.

9. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan saya penulis, **HI 2019** terutama **Rini Damayanti**, teman seperjuangan, sahabat saya yang senantiasa mau berusaha berdua dan saling mengadu nasib baik suka maupun duka selama kuliah terlebih di akhir penyelesaian studi dan juga kepada **Alif Mulqi, Kholik Muharram, Erwin Amiruddin, Urfiah, Eki Safitri**, yang saya anggap seperti saudara sendiri yang selalu saling support dalam keadaan apapun. Banyak cerita yang telah penulis lalui Bersama kalian dan penulis merasa banyak perubahan positif yang terjadi pada diri ini. Suka dan duka turut mewarnai kebersamaan kita baik itu lika liku pergi kuliah, mengerjakan tugas kuliah dan pada saat kita liburan dan berpetualang Bersama. Dan terima kasih juga kepada **kak Alif Akbar** senior sekaligus teman yang senantiasa memberikan arahan, ilmu dan membantu penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
10. Terima kasih kepada senior aku yang satu ini dan sangat-sangat cerewet **kak Selfi**, yang selalu siap menjawab setiap pertanyaan yang selalu saya tanyakan sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dan selalu jadi partner begadang sampai pagi.
11. Terima kasih kepada **Griya Squad** yang sudah jadi keluarga selama di majene. Ada **Cemma, kak Arhal, Fatimah kecil, Fatimah gendut, Ulfiana, Munawarah, Fatma, Anbar, Irma, kak Mifta, kak Uni dan bocil-bocilku** yang beberapa tahun kebersamai dan melalui drama hidup di Majene suka maupun duka. Terima kasih untuk hal-hal yang

sudah kita lewati Bersama, terima kasih juga karena selalu memberikan support dan semangat kepada Ainun yang banyak kurangnya dan harus banyak belajarnya. *I Love u so much and always be happy guys!* Ainun bersyukur bisa mengenal orang-orang seperti kalian. Syukran lillahi ‘ala ni ‘matihi Ashkuru Allah min ‘amaqi qalbi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda untuk semuanya, dan semoga apa yang didapatkan selama kuliah di berkahi oleh Allah. Barakallah fiikum. Penulis sadar bahwa semua manusia punya kekurangan dan kelebihan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhana Wata ‘ala. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna untuk perbaikan dari skripsi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua

ABSTRAK

Kepulauan Solomon secara resmi mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara (1983-2020). Oleh karena itu, Tiongkok yang dalam Upaya memperkuat pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan mendekati diri secara politik ke Kepulauan Solomon. Alhasil melalui mekanisme internal, pemerintah memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang berdampak pada berakhirnya hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Taiwan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Kepulauan Solomon mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke Tiongkok serta mengetahui dampak dari peralihan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional untuk menganalisis alasan kepulauan Solomon dalam melakukan peralihan hubungan diplomatik ke Tiongkok dan dampak dari kebijakan peralihan hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mendapatkan data dari *internet based reseach* dan *document based research* dari metode pencarian data terdiri atas buku *ebook*, berita, artikel, jurnal nasional maupun internasional, skripsi, dan tesis dan sebagainya.

Kata Kunci : Hubungan Diplomatik, Kepulauan Solomon, Taiwan, Tiongkok.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PRASYARAT GELAR	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi.....	10
BAB II TELAAH TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Telaah Konseptual.....	11
2.1.1 <i>Kebijakan Luar Negeri</i>	<i>11</i>
2.1.2 <i>Kepentingan Nasional</i>	<i>22</i>
2.2. Tinjauan Pustaka.....	28
BAB III HUBUNGAN KEPULAUAN SOLOMON DAN TAIWAN SEBELUM PROSES PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK	32
3.1 Sejarah Hubungan Kepulauan Solomon dan Taiwan.....	32
3.2 Kerja sama Taiwan di Kepulauan Solomon.....	40
3.3. Hubungan Tiongkok dan Kepulauan Solomon	47
3.4. Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dengan Tiongkok.....	49
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN	

DIPLOMATIK KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE TIONGKOK.....	52
4.1 Analisis Peralihan Kepulauan Solomon ke Tiongkok.....	52
4.2.Dampak Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon ke Tiongkok.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah penting dalam persaingan politik antara Tiongkok dan Taiwan. Peralihan pengakuan global dari Taiwan (*Republik of China*) ke Tiongkok (*People's Republic of China*) pada tahun 1979 membuat Negara-negara Pasifik Selatan (PICS) yang baru saja merdeka diambang keseimbangan antara berpihak dengan Tiongkok atau Taiwan. Sebagian besar PICS pada akhirnya memilih untuk patuh terhadap peraturan internasional dalam prinsip *One China Policy*. Meskipun demikian, beberapa dari mereka tetap mendukung Taiwan sebagai entitas yang berdaulat¹.

Salah satu isu penting dalam pertikaian politik Tiongkok-Taiwan adalah Kepulauan Solomon, yang merupakan negara terbesar ketiga di kawasan Pasifik, dengan luas lautan 1.300 km persegi yang terdiri dari enam pulau utama dan sejumlah pulau kecil. Negara ini memiliki banyak aset alam, terutama hutan, aset perairan, kelautan dan perikanan, mineral, dan lahan hortikultura. Meskipun demikian, aset-aset ini tidak didistribusikan secara merata di sembilan provinsi tersebut². Ketika provinsi tersebut memperoleh kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri pada tahun 1978, pemerintahan tawar-menawar untuk menjalin hubungan politik dengan Tiongkok. Meski demikian, pada saat yang

¹ Numadi, Katong Ragawi. "Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019." *Jurnal Hubungan Internasional* 16.2 (2023)

² UN WOMEN, "Pulau Solomon", https://asiapacific-unwomen-org.translate.google/en/countries/fiji/co/solomonislands?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#1_anc. Diakses pada 20 Maret 2024.

sama, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka hubungan dengan pemerintah Taiwan. Pada tahun 2021, Pemerintah Kepulauan Solomon secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat dan merupakan gambaran asli kelompok masyarakat Tiongkok. Sejak saat itu, Kepulauan Solomon adalah salah satu dari segelintir negara di dunia yang belum pernah membuka hubungan resmi dengan Tiongkok, meskipun negara tersebut belum sepenuhnya menutup kolaborasi dalam kerangka pertukaran dan investasi.³

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2019, pemerintahan baru *Democratic Coalition Government for Advancement (DCGA)* yang baru di bawah pimpinan Manasseh Sogavare menekankan pentingnya menjajaki hubungan perdamaian Kepulauan Solomon dengan Taiwan. Oleh karena itu, melalui komponen dalam negeri, otoritas publik memilih untuk membuka hubungan strategis dengan Tiongkok dan mengakhiri pengakuan lama Tiongkok atas kekuasaan Taiwan. Berbeda dengan negara lain, misalnya Nauru, Kiribati, dan Kepulauan Marshall, yang telah beberapa kali melakukan pengakuan perdamaian antara Tiongkok dan Taiwan, keputusan Kepulauan Solomon untuk memandang Tiongkok adalah masalah lain. Perubahan dalam hubungan perdamaian dengan salah satu negara terbesar di Pasifik Selatan mempunyai konsekuensi penting bagi ukuran organisasi politik Taiwan secara universal. Saat ini hanya ada empat belas negara terbesar di dunia yang menyadari kehadirannya kedaulatan Taiwan. Sebanyak tiga belas di antaranya merupakan negara-negara kecil Pasifik Selatan mencakup Palau, Nauru, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. Namun, bagi

³ Ibid.

Tiongkok, pengakuan atas kekuasaan Kepulauan Solomon merupakan pencapaian politik yang signifikan dalam mengurangi kehadiran Taiwan dan memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan.⁴

Kepulauan Solomon sebagai salah satu negara terbesar di Kawasan Pasifik Selatan berperan penting dalam kontestasi kebijaksanaan antara Tiongkok dan Taiwan. Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1978, pemerintahan negara yang baru didirikan dihadapkan pada kesulitan apakah akan membangun hubungan perdamaian dengan Taiwan, yang berarti akan bertentangan dengan Tiongkok yang memiliki kekuatan politik yang signifikan di dunia internasional. Pada mulanya hal ini memberikan gambaran adanya kecenderungan untuk membuka hubungan perdamaian dengan Tiongkok. Meskipun demikian, pada tahun 1983 pemerintah Kepulauan Solomon secara resmi memilih untuk menerima kekuasaan Taiwan atas Tiongkok. Pada hakikatnya kedekatan Kepulauan Solomon dan Taiwan terjalin sedikit demi sedikit bermula dari hubungan kasual sejak awal kemerdekaan. Dalam periode tersebut, terdapat empat kali kunjungan langsung Kepala Negara Kepulauan Solomon ke Taiwan. Pada tahun 1983, Pemerintah Kepulauan Solomon memilih untuk menjalin hubungan tingkat konsuler dengan Taiwan. Hubungan perdamaian formal tersebut di tandai dengan pendirian konsulat Taiwan di ibu kota Honiara. Implementasi hubungan politik yang lebih kuat mendasari terbukanya kerja sama di berbagai bidang bagi kedua negara. Seperti pada

⁴ Santoso, Victoria Amandani, Reni Windiani, and Satwika Paramasatya. *Kompetisi Diplomasi: Taiwan (ROC) versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon tahun 2016-2019/10/HI/2021*. Diss. Faculty of Social and Political Science, 2021. Hal. 297.

bidang ekonomi, pemerintah Kepulauan Solomon melakukan kerja sama dengan Taiwan untuk mengatasi keuangan publik di negara tersebut. Sehingga pada tahun 1990an terdapat program perbaikan publik dengan istilah *The International Cooperation and Development Fund (ICDF)*⁵ yang mana pemerintah Taiwan setuju untuk menjalankan Lembaga tersebut sebagai lembaga utama⁶.

Penyesuaian pusat strategi Taiwan untuk menjaga keasliannya telah menempatkan Kepulauan Solomon sebagai salah satu titik dukungan penting. Dengan tujuan agar hubungan baik antara kedua pihak terus meningkat, ditandai dengan berdirinya dua konsulat Kepulauan Solomon di Taipei pada tahun 2005. Begitu pula pada tahun 2007, delegasi Kepulauan Solomon di PBB bersama dengan perwakilan dari negara-negara pendukung Taiwan lainnya memulai pembicaraan tentang masalah kekuatan Taiwan pada rencana Pertemuan Umum Negara-Negara Bersatu (PBB). Inisiatif yang didukung oleh pembayar pajak dan kegiatan kelompok masyarakat Kepulauan Solomon dari seluruh wilayah semakin bergantung pada penyebaran pendanaan dari Taiwan. Bahkan pada tahun 2008 lalu, organisasi sepak bola Kepulauan Solomon menyebutkan adanya pembiayaan sebesar 30 ribu USD dari pemerintah Taiwan untuk mendukung kerjasamanya di kompetisi sepak bola tingkat Oseania.⁷

Berdasarkan hal tersebut, Taiwan bisa dipastikan menjadi kunci dibalik

⁵ Kerja sama Taiwan-Kepulauan Solomon yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sosio-ekonomi, kemampuan sumber daya manusia, dan mempromosikan hubungan ekonomi antar negara melalui bantuan teknis yang berfokus kepada 4 bentuk : pinjaman dan investasi, kerjasama teknis, bantuan kemanusiaan, serta pendidikan dan pelatihan internasional.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lestari, Bunga. 2022. Upaya Tiongkok dalam Mengalihkan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon. Padang: Universitas Andalas.

dedikasi Kepulauan Solomon dalam mendukung otonomi Taiwan selama lebih dari 10 tahun. Berdasarkan Change Aqorau,⁸ sejak awal hubungan strategis antara Kepulauan Solomon dan Taiwan pada umumnya didasarkan pada kepentingan politik dan keuangan kelas dunia yang terkadang sangat merugikan masyarakat Kepulauan Solomon. Meningkatnya pengaruh Tiongkok di kalangan *Pacific Islands Centre (PIC)* berakhir dengan keputusan pemerintah Kepulauan Solomon yang berubah menjadi mendukung Tiongkok pada tahun 2019. Langkah ini dimulai dengan dorongan pemerintah Kepulauan Solomon di bawah pimpinan negara Ricky Hoenipwela untuk mengaudit kebijakan negara tersebut.

Hubungan dengan Taiwan dengan mempertimbangkan elemen politik internal dan visi untuk mendorong strategi kolaborasi dan organisasi Selatan di mana Tiongkok dapat berkontribusi secara luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa *People's Alliance Party (PAP)* akhirnya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum tahun 2019, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Manasseh Sogavare memiliki pandangan serupa, bahwa potensi peluang untuk memindahkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok perlu dipertimbangkan. Dengan cara ini, mengevaluasi hubungan dengan Taiwan serta mencari peluang untuk berubah menjadi mendukung Tiongkok adalah rencana penting dalam rencana sementara Pemerintah Aliansi untuk Kemajuan (DGCA) yang baru saja dibentuk. Melalui serangkaian proses evaluasi, yang diikuti dengan tinjauan terhadap beberapa penanggung jawab “serikat” Tiongkok, pemerintah Kepulauan Solomon pada bulan September 2019 akhirnya memilih untuk memihak

⁸ Aqorau, Transform, 2021. “Solomon Islands Foreign Policy Dilemma and The Switch from Taiwan to China”, *The China Alternative*. Australia: ANU Press.

Tiongkok dan fokus pada kebijakan *Belt And Road Initiative* (BRI).

Pilihan Kepulauan Solomon untuk beralih mendukung Tiongkok merupakan kerugian besar bagi Taiwan. Hanya empat dari empat belas penanggung jawab yang tetap fokus mendukung kebebasan Taiwan. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Kepulauan Solomon dipandang sebagai kekuatan lokal yang signifikan dan mitra penting bagi Taiwan di Pasifik Selatan. Mulai sekitar tahun 2019, Kepulauan Solomon tetap menjadi penerima manfaat terbesar dari pemandu asing dari Taiwan. Oleh karena itu, pemerintah Kepulauan Solomon dengan andil menjunjung tinggi kerja sama Taiwan dalam setiap rencana internasional, bahkan sampai titik terakhir sebelum keputusan perubahan yang bersifat perdamaian dapat dipahami. Pilihan Kepulauan Solomon (diikuti Kiribati) untuk berubah mendukung Tiongkok merupakan kerugian besar bagi Taiwan⁹. Ditandai dengan kunjungan langsung Kepala Negara Sogavare ke Beijing pada bulan Oktober 2019. Kedua badan legislatif tersebut kemudian meresmikan hubungan strategis serta menandai rekonsiliasi Kepulauan Solomon dalam rencana kemajuan *Belt And Road Initiative* (BRI). Dalam pertemuan langsungnya dengan Xi Jinping dan Li Keqiang, dua pemimpin tertinggi Tiongkok, PM Sogavare menyampaikan kewajiban luar biasa negaranya untuk mengikuti standar Satu Tiongkok sesuai dengan perjanjian Partai PBB. Selain itu, dengan landasan hubungan strategis langsung, Kepulauan Solomon berkeinginan untuk meningkatkan kegiatan pertukaran dan kontribusi yang lebih besar dari organisasi-organisasi Tiongkok

⁹ Putri, Adinda Normala. "Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok." *Jurnal Asia Pacific Studies* 3.2 (2019).

dalam siklus perbaikan moneter dan lingkungan bisnis di distrik Kepulauan Solomon. Hal ini termasuk menggantikan Taiwan sebagai pendukung utama pengelolaan program tersebut.¹⁰

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Batasan Masalah digunakan demi membatasi analisis agar tidak merambat ke masalah yang lainnya dan juga lebih memudahkan untuk berfokus pada tujuan penelitian. Mengingat landasan di atas, eksplorasi ini akan memusatkan perhatian pada perubahan hubungan strategis antara Kepulauan Salomon dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa alasan Kepulauan Solomon melakukan Peralihan Hubungan Diplomatik ke Tiongkok?
2. Bagaimana Dampak dari Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon ke Tiongkok ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁰ Wiratama, Kadek Andhika, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and Adi Putra Suwecawangsa. "Faktor Pendorong Kepulauan Solomon Menyepakati Kerja Sama Belt And Road Initiative (BRI) Dengan Tiongkok Pada Tahun."166.

1. Untuk mengetahui alasan kepulauan Solomon dalam melakukan peralihan hubungan diplomatik ke Tiongkok
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan peralihan hubungan diplomatik kepulauan Solomon ke Tiongkok.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang mempelajari hubungan global sehingga dapat menambah referensi penelitian dan sumber pemahaman.

2. Manfaat Praktis

1. Menambah pemahaman terhadap strategi kemajuan hubungan perdamaian di Kepulauan Solomon mulai dari Taiwan hingga Tiongkok.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan dalam mengumpulkan data.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menggunakan data yang bernilai fakta, jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif sebuah peristiwa atau fenomena. Setelah itu, penelitian menghasilkan Kesimpulan yang mendalam tentang masalah, peristiwa, atau tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menggunakan

data yang bernilai fakta, jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 2 metode: *Internet based research* dan *dokument based research*. *Internet based research* terdiri dari berita online, e-book, video online, dan artikel online. Sedangkan *dokument based research* terdiri dari buku, skripsi, artikel, jurnal dan sebagainya.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya atau berasal dari studi yang lebih dahulu diteliti oleh peneliti. Bersumber dari berita online, e-book, video online, dan artikel online. Sedangkan *dokument based research* terdiri dari buku, skripsi, artikel, jurnal dan sebagainya.¹¹

1.4.4 Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari artikel online, berita online, dan sumber-sumber lainnya. Penelitian kualitatif mudah membantu peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan mudah untuk menentukan tujuan.

1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan pada juli-agustus 2024 dengan

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, ‘*Metodologi penelitian*’ (KBM INDONESIA, Medan, 2021), Hlm.41

lokasi penelitian dilakukan di dua tempat berbeda yaitu perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan perpustakaan Fisip. Ada juga data yang di dapatkan dari website yang sesuai dengan penelitian dan penambah referensi.

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini terdiri atas: dan diuraikan kedalam beberapa bab.

Bab I : Pada bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II: Pada bab ini berisi tentang telaah konseptual dan tinjauan Pustaka dalam penelitian. Dengan konsep yang digunakan adalah Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang hubungan Kepulauan Solomon dan Taiwan.

Bab IV: Pada bab ini berisi tentang Analisis Kepulauan Solomon melakukan Peralihan Hubungan Diplomatik ke Tiongkok. Dan bagaimana Dampak dari Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon ke Tiongkok.

Bab V: Pada bab ini berisi penutup yang terdiri atas Kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TELAAH TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Konseptual

2.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah suatu konsep yang diutarakan oleh K.J Holsti. Bahwa Kebijakan luar negeri adalah sebuah gagasan yang bertujuan untuk membuat suatu rumusan agar dapat memecahkan suatu permasalahan atau perubahan di suatu wilayah. Tujuan dan kebijakan masing-masing negara berbeda-beda dan jika ada kebijakan luar negeri maka setiap negara harus setara dan paham dalam pelaksanaannya. Kerjasama, hal tersebut dilaksanakan demi mencapai dan memaksimalkan kebutuhan pribadi dan kepentingan kolektif.

Disamping itu, kebijakan luar negeri juga dapat di artikan sebagai upaya yang dilakukan setiap negara untuk memperoleh keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, memperoleh gengsi dan tujuan menjaga keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri terdapat tiga rumusan yang menjadi tujuan suatu negara dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negerinya, antara lain:

1. Nilai-nilai, tujuan suatu negara, merupakan faktor penting dalam mendorong perumusan politik luar negeri. Memang benar, kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan tujuan suatu negara.
2. Unsur waktu, dalam pelaksanaan Kebijakan luar negeri terdapat unsur waktu, yang harus dicapai tujuan untuk mencapai tujuan.

3. Jenis tuntutan tujuan adalah salah satu permintaan yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.
4. Dalam kemampuannya merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara mempunyai landasan dan seperangkat asumsi serta tujuan tertentu dalam mempertimbangkan keamanan nasional. Sedangkan unsur-unsur yang digunakan dalam kebijakan luar negeri adalah pendapat, sikap yang diambil atau didukung negara lain, keputusan dan tindakan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang tepat.

Masing-masing negara mempunyai kepentingan dan kebutuhan terhadap berbagai aspek dalam hal ini mencakup perekonomian, stabilitas keamanan dan kepentingan elit politik. Negara-negara tersebut memiliki kebebasan dalam menentukan arah kebijakannya berdasarkan tujuan dan arah yang ditempuh berdasarkan kepentingan, akan tetapi negara tersebut harus memperhitungkan kepentingan negara lain yang juga patut dihormati agar tidak terjadi campur tangan yang menimbulkan ancaman atau intervensi yang dapat menyebabkan gangguan stabilitas keamanan.

Kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan tiga cara: perang, kerja sama ekonomi, dan perdamaian. Dalam 3 cara ini. Kebijakan luar negeri dilakukan sedemikian rupa sehingga negara dan rakyatnya mencapai keamanan di luar kendali pemerintah. Untuk mencapai tujuan negara atau kepentingan nasional tertentu, pengambil kebijakan di suatu negara

mengembangkan strategi atau rencana aksi untuk berhubungan dengan negara lain, serta dengan entitas internasional lainnya. Masalah ini apa yang kita sebut kebijakan luar negeri. Rosenau mendeskripsikan kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu negara melalui sikap dan aktivitas umum untuk mengatasi dan mengambil manfaat terhadap lingkungan eksternalnya. Disamping hal tersebut, kebijakan luar negeri bertujuan agar menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup sebuah negara.¹²

Hal serupa juga ditegaskan oleh K.J Holsti bahwa tujuan kebijakan luar negeri mencakup seluruh tindakan dan kegiatan negara terhadap lingkungan eksternalnya dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari lingkungan tersebut, serta memperhatikan berbagai kondisi internal yang mendukungnya merumuskan tindakan-tindakan tersebut.¹³

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu dari bidang kajian hubungan internasional dan kebijakan luar negeri karena tidak hanya mencakup eksternalitas suatu negara, namun juga negara lain. Dalam kajian kebijakan luar negeri sebagai sebuah sistem, rangsangan terhadap lingkungan luar yang merupakan masukan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri sebuah negara dirasakan melalui suatu proses konversi menjadi hasil. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan kebijakan luar negeri negara.¹⁴

¹² Jack C Plano dan Roy Olton, dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani,(2005) *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, Halaman 49.

¹³ Ibid

¹⁴ K.J Holsti, 1992. Politik Internasioanal: Suatu Kerangka Analisis. Dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. YANYAN Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasioanal*. (Bandung, PT

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan sebuah negara dengan lingkungan eksternalnya yang dirumuskan berdasarkan kepentingan dari negara tersebut, kemampuan, pengambil kebijakan, kebutuhan dan aspirasi internasional masyarakat. Dalam kajian kebijakan luar negeri, ilmu dasar yang perlu diketahui adalah bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan “*action theory*” atau kebijakan sebuah negara yang menargetkan negara lain agar dapat mencapai kepentingan tertentu. Ini berdasarkan pada makna situasi dimana, yang mencakup lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal, mengingat tujuan yang ingin dicapai serta fasilitas dan kemampuan yang dimilikinya.

Adapun tindakan eksternal suatu negara yang termasuk didalamnya merupakan kebijakan luar negeri negara tersebut, hal tersebut mencakup berbagai jenis dan bentuk. Oleh sebab itu, terdapat ahli mengonsep bentuk dan jenis tindakan eksternal di suatu negara. Rossenau mengemukakan konsep kebijakan luar negeri dalam tiga konsep yang masing-masing konsepnya saling bergantung, yaitu:

1. kebijakan luar negeri dalam arti seperangkat arah (*a set of Directions*), yaitu memuat seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi tersebut merupakan hasil pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap posisi strategis negaranya dalam politik dunia.

2. Kebijakan luar negeri dalam arti strategi atau rencana aksi perikatan (*as set of commitment and plans for action*), yang memuat cara dan sarana yang dianggap mampu merespons hambatan dan tantangan lingkungan eksternal. Strategi suatu negara didasarkan pada orientasi kebijakan luar negerinya, yang merupakan hasil penafsiran orientasi kebijakan luar negeri tersebut oleh para elite dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang memerlukan strategi untuk mencapai tujuan dan menghadapi situasi tersebut.
3. Kebijakan luar negeri mengenai bentuk perilaku (*as a form of behavior*) adalah fase kebijakan luar negeri yang paling empiris. Konsep ketiga tersebut berkaitan dengan langkah-langkah konkrit yang diputuskan oleh pengambil keputusan untuk merespon peristiwa dan situasi eksternal yang merupakan penjabaran dari orientasi dan artikulasi tujuan dan komitmen tertentu. Perilaku di atas tercermin baik dalam tindakan yang diambil maupun dalam pernyataan yang di keluarkan oleh pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri adalah penerapan strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu.¹⁵

Modelski mengutarakan pendapatnya dengan mendeskripsikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah sistem kegiatan. Dalam perspektif ini, kebijakan luar negeri dapat dipandang sebagai suatu sistem di mana keputusan-keputusan kebijakan luar negeri dirumuskan dan direncanakan untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, Modelski menunjukkan bahwa kebijakan

¹⁵ Perwita & Yani,(2005). *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

tertentu dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan harus dikembangkan dengan tujuan tertentu.

Konsep dasar kebijakan luar negeri adalah :¹⁶

1. Pembuat kebijakan
2. Tujuan
3. Prinsip
4. Kekuasaan untuk melaksanakan
5. Konteks di mana kebijakan luar negeri dirumuskan.

Dalam karya tulisnya yang berjudul *Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction*, ia mengemukakan ada tiga hal yg penting untuk dipahami terhadap kebijakan luar negeri secara keseluruhan, di sebabkan kebijakan luar negeri tidak dapat hanya dinilai dari satu sudut pandang saja. Ketiga elemen itu adalah analisis tingkat individu, analisis tingkat negara bagian, dan analisis tingkat sistem. Dengan mengetahui ketiga hal tersebut, dapat kita pahami hubungan komparatif dalam hal pengambilan keputusan dan perilaku kebijakan luar negara dan interaksi antar negara. Bagian ini dikenal sebagai metode komparatif. Cara ini tergolong penting digunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik luar negeri dan menyikapi secara tepat tindakan aktor lain. Tujuan utama dari perbandingan kebijakan luar negeri merupakan cara untuk memperoleh pemahaman umum terhadap bagaimana kebijakan luar negeri tersebut dirumuskan, alasan mengapa para pemimpin mengambil keputusan itu, dan

¹⁶ Breuning, (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New York: Palgrave Macmillan.

mengapa negara-negara terlibat di dalamnya. Perilaku spesifik kebijakan luar negeri, serta menilai peluang dan keterbatasan dalam sistem internasional.¹⁷

Menurut Jack. C. Plano dalam Kamus Hubungan Internasional menjelaskan tentang kebijakan luar negeri, yaitu: “Suatu strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pengambil keputusan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut yaitu tujuan nasional”.

Selain itu, Plano menyampaikan berbagai langkah yang dapat dilakukan dalam proses kebijakan luar negeri, yakni:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional dalam bentuk tujuan tertentu. Menentukan faktor situasional lingkungan domestik dan internasional dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri.
2. Menganalisis kapabilitas nasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan rencana atau strategi pemanfaatan kemampuan nasional untuk mengatasi variabel-variabel tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan tindakan yang dianggap perlu.
5. Secara berkala meninjau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kebijakan luar negerinya, suatu negara

¹⁷ Breuning, (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New York: Palgrave Macmillan.

melakukan hal ini sebagai alat yang akan digunakan. Holst membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi lima, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi militer dan aksi rahasia serta senjata, perang dan pengaruh politik.¹⁸

Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tujuan agar dapat menjaga dan memelihara kontinuitas hidup suatu negara. Apalagi menurut Rosenau, kita juga dapat melihat kebijakan luar negeri sebuah negara, yang dapat masuk kedalam fenomena yang cukup luas dan kompleks, didalamnya termasuk kehidupan internal dan kebutuhan eksternal, yang meliputi kehidupan internal dan eksternal, contohnya aspirasi dan atribut nasional, budaya, konflik, dan kekuatan institusi, dan kegiatan rutin yang bertujuan agar mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum dan geografis sebuah negara sebagai negara bangsa dalam lingkungan eksternalnya.

Menurut Holsti, Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri meliputi:¹⁹

- a. Menjelaskan pertimbangan kepentingan nasional terhadap bentuk tujuan dan sasaran tertentu.
- b. Menentukan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional sehubungan yang bertujuan untuk mengedepankan kebijakan luar negeri.

¹⁸ Holsti, (2006). *Making America Foreign-Policy* New York:Routledge.

¹⁹ Holsti dan Jervis. (2005), *American Foreign Policy*, New York Routledge.

- c. Menganalisa kapabilitas nasional agar dapat menjangkau hasil yang dituju.
- d. Menyusun rencana atau strategi penggunaan kemampuan nasional untuk mengatasi variabel tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- e. Melakukan tindakan yang diperlukan.²⁰

Tujuan kebijakan luar negeri menurut Rosenau, mengemukakan bahwa fungsi dari proses perumusan tujuan negara. Tujuan-tujuan tersebut dipengaruhi oleh tujuan di masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan dengan tujuan kebijakan luar negeri jangka panjang yang bertujuan untuk menjamin perdamaian, keamanan, dan kekuasaan suatu negara.

Rosenau juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan seperangkat komitmen dan rencana aksi (*as a set of commitmen and action plan*). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan luar negeri dapat juga berupa rencana ataupun komitmen konkrit yang kemudian dikembangkan oleh para pengambil keputusan agar dapat diperluas dan dipelihara berdasarkan situasi lingkungan eksternal yang sesuai arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Adapun rencana aksi tersebut mencakup tujuan-tujuan spesifik dan juga cara ataupun sarana demi tercapainya apa yang dianggap tepat untuk menanggapi peluang dan tantangan di luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan suatu bentuk perilaku dan tindakan (*as a form of*

²⁰ Rosenau dalam Yani (2010).

behavior). Pada tataran tersebut, kebijakan luar negeri berada pada tataran yang lebih empiris, terutama berupa tindakan konkrit yang diputuskan oleh pengambil keputusan berdasarkan peristiwa dan situasi lingkungan eksternal. Langkah-langkah itu di putuskan didasarkan pada orientasi umum yang dipercaya dan dikembangkan oleh komitmen dan tujuan yang lebih spesifik, sehingga kebijakan luar negeri bisa dilihat perbedaannya sebagai seperangkat orientasi, seperangkat komitmen dan rencana aksi maupun berupa bentuk perilaku. Masing-masing negara mengasosiasikan negaranya dengan peristiwa dan situasi di luar negeri.²¹

Sumber utama yang masuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri menurut Rosenau adalah: Sumber sistemik, yaitu sumber yang asalnya terdapat di lingkungan eksternal suatu negara. Sumber daya tersebut mendefinisikan struktur hubungan antar negara besar, pola aliansi yang terbentuk antar negara, dan faktor situasional eksternal yang juga bisa berupa permasalahan atau krisis. Hal tersebut bermaksud bahwa struktur hubungan antar negara besar merupakan jumlah negara besar yang berkontribusi pada struktur tatanan hubungan internasional dalam hal distribusi keterampilan antarnegara. Sementara itu, faktor siklus eksternal adalah stimulan tak terduga yang asalnya terdapat di situasi internasional saat ini.

Sumber daya masyarakat (*social resources*) adalah sumber daya yang bersumber dari lingkungan internal. Sumber-sumber tersebut

²¹ Ibid, Hlm 7-8

meliputi berbagai faktor seperti budaya dan sejarah, perkembangan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini masyarakat. Budaya dan Sejarah tersebut meliputi nilai-nilai, norma, tradisi, dan sejarah masa lalu yang menjadi dasar hubungan antar anggota suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi melibatkan kekuatan sebuah negara demi mencapai kemakmuran negara tersebut. Hal ini bisa mendukung kepentingan negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Sumber pemerintah (*governmental sources*) adalah sumber internal yang didalamnya terdapat tanggung jawab politik serta struktur pemerintahan. Tanggung jawab kebijakan contohnya pemilu, persaingan partai dan tingkat kemampuan pengambil keputusan dalam merespon situasi eksternal secara fleksibel. Sedangkan dalam struktur kepemimpinan terdapat juga kelompok ataupun individu di pemerintahan.

Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), yaitu sumber internal tersebut mengkaji tentang sejarah, bakat, dan nilai kepribadian elit politik yang kemudian dapat berpengaruh pada persepsi, perhitungan, dan juga perilaku kebijakan luar negerinya. Hal tersebut juga mencakup pandangan elit politik terhadap keadaan alamiah di kancah internasional dan tujuan nasional yang ingin dicapai.

Selain keempat sumber-sumber kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan di atas, perhatian khusus juga diberikan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan luas wilayah negara dan jumlah penduduk, letak geografis, dan teknologi yang termasuk dalam sumber sistemik atau

kemasyarakatan. Berdasarkan berbagai faktor yang berbeda, Rosenau memberikan saran agar mengembangkan seperangkat informasi, dimana kebijakan luar negeri bisa memilih dan menggabungkan faktor-faktor yang lebih penting dan patut mendapat perhatian khusus untuk menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara yang diteliti.²²

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional atau dalam ungkapan Prancis yaitu *raison d'Etat* adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya. Sesuai standar dalam Studi Hubungan Global, gagasan ini penting sebagai alasan bagi negara-negara dalam mengarahkan hubungan internasional. Pendapat Machiaveli mengenai kepentingan publik umumnya disinggung secara praktis dan hipotetis, sebagai legitimasi cara berperilaku global negara-negara yang mengabaikan kepentingan utama dari sisa-sisa sebelumnya, khususnya agama dan kualitas etika. Negara diperoleh dari permintaan surgawi dan bertanggung jawab terhadap kepentingan-kepentingan khusus negara, khususnya kepentingan umum. Kepentingan umum erat kaitannya dengan kekuasaan negara sebagai tujuan dan instrumen, khususnya yang bersifat merugikan (*hard power*). Ketika kepentingan-kepentingan umum berencana untuk mencari kekuasaan tanpa henti digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan-kepentingan umum, maka akibat-akibat dalam kerangka global yang dipandang sebagai kekacauan kecuali kekuatan itu sendiri adalah persaingan, berkembangnya pengaruh secara keseluruhan,

²² Rosenau dalam Yani, (2010):Halaman 11-12.

pertikaian. dan perang.

Penggambaran gambaran dan perbincangan mengenai kekhasan kepentingan publik saat ini akan diperkenalkan dalam buku harian “*Intermestic Diary of Global Studies*”²³. Pemahaman tentang kepentingan publik dapat berfluktuasi bergantung pada keadaan tertentu, kualitas sosial, sejarah, dan kesulitan yang dihadapi oleh suatu negara. Biasanya, kepentingan umum meliputi:

1. Keamanan dan Pengamanan. Menjaga kepercayaan regional negara, peluang politik dan pengelolaan kehidupan daerah setempat. Hal ini mencakup upaya untuk mengendalikan bahaya luar seperti bentrokan militer, perang psikologis, bahaya keamanan jaringan, dan perluasan senjata.
2. Bantuan Keuangan Pemerintah. Menggabungkan peristiwa finansial yang mendukung, intensitas yang diperluas, pemeliharaan aset, soliditas nilai, bisnis, dan penyebaran kelimpahan yang adil. Faktor-faktor seperti perdagangan internasional, investasi, inovasi, dan akses terhadap aset merupakan kekhawatiran utama dalam mencapai kepentingan keuangan publik.
3. Strategi dan Hubungan Asing. Mendorong kepentingan publik melalui strategi, kolaborasi global, dan hubungan timbal balik atau multilateral dengan berbagai negara. Hal ini termasuk menjaga stabilitas lokal dan global, mengupayakan strategi internasional yang baik, dan memajukan

²³ Arry Bainus & Junita Budi Rachman, Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Volume 2, No. 2 *Journal of Internasional Studies*, 2018 (109-115).

gambaran positif di tingkat global. Kesejahteraan Sosial dan Kebutuhan Rakyat. Membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui pelayanan publik yang baik, pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim. Keberlanjutan lingkungan menjadi aspek penting dalam mencapai kepentingan nasional jangka panjang.

Kepentingan nasional merujuk pada serangkaian tujuan, nilai, dan kebutuhan yang dianggap penting dan prioritas utama bagi suatu negara. Ini adalah konsep yang melibatkan pertimbangan terhadap keamanan, keberlanjutan ekonomi, kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan tujuan-tujuan strategis lainnya yang mendukung kelangsungan dan kemajuan negara.²⁴

Penting untuk diingat bahwa kepentingan nasional tidak selalu bersifat egois atau bertentangan dengan kepentingan global. Dalam era globalisasi, banyak isu yang membutuhkan kerjasama antarnegara untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Negara-negara sering kali menjalin hubungan dan kemitraan untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka sambil mempertimbangkan kepentingan bersama dan kestabilan global.

²⁴ Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, “*Definisi Kepentingan Nasional*,” [https://www. Dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/defining-national- interest](https://www.Dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/defining-national-interest).

Perumusan dan perlindungan kepentingan nasional adalah tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Dalam demokrasi, pemerintah bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan publik secara menyeluruh dan menjawab keinginan individu dalam mengambil pilihan yang berkaitan dengan strategi di berbagai bidang. Tugas otoritas publik tentu sangat besar dalam menyusun strategi, namun secara keseluruhan kepentingan negara adalah kepentingan daerah, sehingga daerahlah yang lebih berperan. Kepentingan umum (*public interest*) merupakan gagasan teoretis karena mencakup kepentingan suatu negara. Kepentingan-kepentingan yang dicapai dengan menggunakan strategi-strategi yang berbeda pada umumnya bernilai tinggi dan harus dipahami, Kepentingan Pertama atau kepentingan-kepentingan yang dipandang vital dan esensial bagi suatu negara. Minat Pertama dalam banyak kasus dihubungkan dengan faktor-faktor yang menjadi kunci ketahanan dan kemajuan negara. Beberapa contoh *First Interest* yang normal meliputi:

Pertama, keselamatan publik adalah salah satu kepentingan terpenting suatu negara. Hal ini termasuk menjaga terhadap bahaya terhadap kepercayaan regional, kekuasaan dan ketahanan negara. Hal ini dapat mencakup penjagaan militer, keamanan garis, penindasan kontra-psikologis, dan asuransi terhadap serangan dari negara lain.

Kedua, pengaruh publik merupakan kepentingan mendasar suatu negara, mengingat kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan pilihan politik, moneter, dan sosial tanpa hambatan dari negara lain. Negara

berupaya untuk mengimbangi dan memperkuat kekuasaan mereka atas wilayah mereka sendiri serta peluang untuk mengelola aset dan strategi internal mereka.

Ketiga, pertumbuhan finansial merupakan salah satu kepentingan penting negara. Hal ini mencakup upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi yang mendukung, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan berupaya memenuhi harapan akan kenyamanan sehari-hari bagi masyarakatnya. Negara-negara biasanya berusaha menjaga kepentingan moneter publik, seperti pertukaran global yang produktif, kepentingan dalam bidang-bidang penting, dan keamanan terhadap praktik pertukaran yang tidak beralasan.

Keempat, berkaitan dengan kepentingan publik, daya dukung alam semakin dianggap sebagai komponen yang penting. Negara-negara berusaha menjaga aset-aset normal yang signifikan, mengurangi dampak buruk terhadap iklim, dan mengambil bagian dalam upaya di seluruh dunia untuk mengatasi perubahan lingkungan. Pemeliharaan alam dapat menjadi perhatian utama karena mempengaruhi soliditas sosial, kesejahteraan umum, dan pengelolaan keuangan jangka panjang.

Kepentingan yang kedua, mencakup berbagai macam kepentingan yang ingin dicapai oleh setiap negara, jika masih dipandang masih bisa dicapai melalui pertukaran maka negara-negara tersebut memilih jalan tersebut dibandingkan berperang. Kepentingan Kedua menyinggung kepentingan yang diinginkan oleh setiap negara, namun, memiliki tingkat

kebutuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan Minat Pertama. Kepentingan ini mencakup hal-hal seperti penambahan finansial, kepuasan dalam negeri, ketenaran di seluruh dunia, dan dampak politik.

Sehubungan dengan Kepentingan Kedua, negara-negara sering kali lebih memilih penyelesaian melalui pertukaran dan diskusi daripada menggunakan kekuatan militer atau perjuangan yang dilakukan secara langsung. Negara-negara mungkin mempunyai keunggulan dalam mengakses aset reguler, sektor bisnis baru, spekulasi, atau pintu pertukaran produktif. Melalui pertukaran dan kolaborasi moneter, negara-negara dapat mencapai tujuan-tujuan ini tanpa terlibat dalam perselisihan yang merugikan.²⁵

Kepentingan dalam negeri, seperti kebutuhan energi, pangan, air, atau kerangka kerja, juga bisa menjadi Kepentingan Kedua. Negara-negara akan mencari pengaturan melalui kesepakatan di seluruh dunia untuk mengatasi permasalahan ini, misalnya, mengakses aset atau mendapatkan bantuan khusus dan moneter. Minat untuk mendapatkan rasa hormat dan gambaran positif di tingkat dunia juga dikenang untuk *Second Interests*. Negara-negara mungkin ingin mendapatkan posisi penting, menjadi anggota asosiasi internasional, atau berperan aktif dalam isu-isu internasional untuk meningkatkan reputasi dan dampaknya. Ketertarikan untuk mempengaruhi strategi dan pilihan di tingkat provinsi atau dunia juga merupakan sebuah permasalahan bagian dari Minat Kedua. Negara-negara akan berusaha

²⁵ *op.cit.* hlm.32.

mendapatkan dukungan atau kesepakatan dengan negara-negara lain melalui kebijaksanaan, pembicaraan, dan penyelidikan politik.²⁶

Keputusan perundingan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan kedua dilakukan mengingat bentrokan bersenjata atau penggunaan kekuatan militer sering kali dianggap sebagai kemunduran akhir yang mahal dan berisiko tinggi. Negara-negara sering kali berfokus pada tujuan yang tenang melalui kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang lebih efisien dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh perjuangan yang dilakukan.²⁷

2.2. Tinjauan Pustaka

Dari penelusuran terdahulu yang dilakukan pencipta, ada beberapa penelitian yang mengkaji permasalahan serupa namun dengan konsentrasi dan judul berbeda.

Katong Ragawi Numadi (2023) berjudul *Periksa Kebijaksanaan Buku Dibalik Strategi Kemajuan Hubungan Strategis Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019*.²⁸ Tulisan ini mengkaji bagaimana Pulau Solomon menjadi kaki tangan penting bagi Taiwan di kawasan Pasifik Selatan di tengah krisis Pilihan-pilihan global sehubungan dengan pengakuan

²⁶ Holsti. KJ, 1987, *Politik Internasional Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta.

²⁷ Holsti. KJ. (1995). *Internasional Politics: Framework of Analysis*. London: Prentice Hall Internasional.

²⁸ Katong Ragawi Numadi (2023) *Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Island dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019*, Jurnal Hubungan Internasional Universitas Bali Internasional Vol 16 no 2.

atas kekuasaan Tiongkok, berdasarkan pedoman satu Tiongkok, Kepulauan Solomon, dan negara-negara Pasifik Selatan, tetap dapat diandalkan dalam mendukung ketergantungan Taiwan. Kepulauan Solomon menjadi Penerima bantuan kemajuan terbesar dari Taiwan berada di kawasan Pasifik Selatan. Namun, di akhir tahun 2019 pemerintah Kepulauan Solomon melakukan strategi peralihan hubungan diskresi dari Taiwan ke Tiongkok. Hal ini ditandai dengan kunjungan pemerintah Kepulauan Solomon sekaligus menanda tangani kerja samanya dalam program Pembangunan *Belt And Road Initiative* (BRI) Tiongkok.

Eksplorasi di masa lalu mengkaji arah strategis peralihan tatanan Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok. Eksplorasi ini sepenuhnya melihat pada interaksi strategis yang berkelanjutan dan metode yang digunakan dalam mengubah hubungan perdamaian. Meskipun demikian, eksplorasi ini akan mengkaji kepentingan publik yang dimiliki Kepulauan Solomon selama kemajuan hubungan politik dan dampaknya.

Kedua, tulisan dari Charilia Riantanti Pramitha (2021) yang berjudul “Bantuan Peningkatan Otoritas Tiongkok *Official Development Assistance* (ODA) Sebagai Alasan Pertukaran Pengakuan Strategis dari Taiwan ke Tiongkok oleh Kepulauan Solomon dan Kiribati” Perguruan Tinggi Sebelas Maret Surakarta. Panduan asing tidak hanya digunakan untuk membantu negara-negara penerima manfaat dalam mengembangkan perekonomiannya, tetapi juga untuk mencapai kepentingan publik, salah satunya adalah Tiongkok. Seperti yang mungkin kita ketahui, Taiwan dan Tiongkok sedang

berkompetisi untuk mencari pengakuan strategis dari berbagai negara.

Kawasan Pasifik merupakan pertarungan politik antara kedua negara karena enam negara di kawasan ini memiliki hubungan strategis Taiwan. Salah satu upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mengambil alih pengakuan Taiwan adalah dengan menawarkan lebih banyak panduan asing ke Kepulauan Solomon dan Kiribati. Eksplorasi ini diharapkan dapat menyelidiki dampak dari panduan asing Tiongkok terhadap strategi internasional Kepulauan Solomon dan Kiribati yang melibatkan gagasan Asing Tidak Dikenal sebagai Instrumen Strategi Internasional. Pemeriksaan semacam ini merupakan eksplorasi subjektif yang berbeda dengan strategi pengumpulan informasi seperti kajian penulisan.

Dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa usulan bantuan ODA Tiongkok yang menerima permintaan Kepulauan Solomon dari Kiribati dan dalam jumlah besar juga terbukti efektif dalam mengubah strategi internasional kedua negara, khususnya memindahkan pengakuan perdamaian mereka dari Taiwan ke Tiongkok. Keunikan ini menunjukkan bahwa Tiongkok melibatkan bantuan ODA sebagai instrumen Strategi Satu Tiongkok dan tujuan menawarkan bantuan ODA oleh Tiongkok untuk mendapatkan pengakuan perdamaian dari Kepulauan Solomon dan Kiribati telah tersampaikan secara efektif.²⁹

Yang ketiga adalah proposisi dari Victoria Amandani Santoso (2021)

²⁹ Charilia Riantanti Pramitha, Skripsi: *Bantuan Official Development Assistance (ODA) Tiongkok sebagai Penyebab Peralihan Pengakuan Diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok oleh Kepulauan Solomon dan Kiribati*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

yang berjudul “Discretion Rivalry: Taiwan (ROC) Versus China (PRC) *in the Kepulauan Solomon 2016-2019*” Perguruan Tinggi Diponegoro Semarang. Pemeriksaan ini menggambarkan pengaturan Taiwan telah selesai untuk Kepulauan Solomon pada masa Presiden Tsai Ing-wen (keduanya masih menjalin hubungan diplomatik resmi), dan termasuk dalam *soft power*.³⁰

Yang keempat digarap oleh Putri Anastasya Wulandari dengan judul “Masalah Pemerintahan Tiongkok yang Belum Dikenal Terhadap Upaya Otonomi Taiwan Pada Masa Presiden Hu Jintano.” Kajian ini membahas tentang strategi internasional Tiongkok terhadap upaya kemerdekaan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao, dan maksud penciptanya adalah untuk menyelidiki strategi internasional Tiongkok terhadap Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao, sekaligus mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi strategi internasional Tiongkok terhadap Taiwan. . Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi eksplorasi subyektif dengan jenis eksplorasi ekspresif yang dilakukan melalui studi tertulis dan penelitian ini menggunakan gagasan kepentingan publik untuk melihat seperti apa kecenderungan Tiongkok dalam strategi internasionalnya terhadap Taiwan.

³⁰ Victoria Amandani Santoso, skripsi: “*Kompetisi Diplomasi Taiwan (ROC) Versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon Tahun 2016-2019*” (Universitas Diponegoro Semarang 2021).

BAB III

HUBUNGAN KEPULAUAN SOLOMON DAN TAIWAN SEBELUM PROSES PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK

3.1 Sejarah Hubungan Kepulauan Solomon dan Taiwan

Sebagai salah satu negara terbesar di Kawasan Pasifik Selatan, Kepulauan Solomon terbilang penting dalam kontestasi diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan. Sejak mendapatkan kemerdekaan penuh dari Britania Raya pada tahun 1978, pemerintahan yang baru berdiri telah dihadapkan pada dilema antara membangun hubungan diplomatik dengan Taiwan atau mengikuti keputusan internasional mengakui kedaulatan Tiongkok. Semula terlihat adanya preferensi membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Akan tetapi pada tahun 1983 Pemerintah Kepulauan Solomon resmi memutuskan memilih mengakui kedaulatan Taiwan ketimbang Tiongkok.³¹ Keputusan Kepulauan Solomon tersebut berlandaskan beberapa faktor:

1. Berkaitan dengan dinamika Perang Dingin yang melibatkan pertentangan Tiongkok dengan kekuatan Barat.
2. Sensitivitas pemerintahan dan masyarakat Kepulauan Solomon terhadap eksistensi Tiongkok sebagai negara komunis.
3. Berhubungan dengan perkembangan perekonomian Taiwan yang pada saat itu jauh lebih baik dibandingkan Tiongkok. Sehingga Pemerintah Kepulauan Solomon mengharapkan Taiwan dapat memberikan kontribusi besar bagi kompleksitas permasalahan pembangunan sosial dan

³¹ Aqorau, Transform. 2021. *Solomon Islands' Foreign Policy Dilemma and the Switch from Taiwan to China in The China alternative: changing regional order in the Pacific Islands*, by Graeme Smith and Terence Wesley-Smith (eds). Canberra: Australian National University Press

ekonominya.³²

Pada dasarnya kedekatan Kepulauan Solomon dan Taiwan dibangun dimulai dari hubungan informal sejak masa awal kemerdekaan. Pada periode tersebut tercatat terdapat empat kali kunjungan langsung Perdana Menteri Kepulauan Solomon ke Taiwan. Hingga kemudian pada tahun 1983 Pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan membangun hubungan tingkat konsular dengan Taiwan. Hubungan diplomatik formal diantara keduanya baru disepakati dua tahun berselang ditandai dengan pendirian Kedutaan Besar Taiwan di Ibu Kota Honiara. Terciptanya relasi diplomatik melandasi peluang kerjasama yang lebih besar bagi kedua pihak. Seiring adanya ambisi besar Pemerintah Kepulauan Solomon dalam mengatasi kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi nasional, pada tahun 1990-an dirancang kerangka program pembangunan nasional dengan istilah *Constituency Development Funds* (CDF) yang mana Pemerintah Taiwan sepakat bertindak sebagai penyedia dana utama.³³

Perubahan fokus kebijakan Taiwan dalam mempertahankan legitimasinya telah menempatkan Kepulauan Solomon sebagai salah satu pilar strategisnya. Sehingga relasi kerjasama kedua pihak terus mengalami peningkatan ditandai dengan pendirian kantor kedutaan Kepulauan Solomon di Taipei pada tahun 2005. Begitu pula pada tahun 2007, perwakilan Kepulauan Solomon dalam UN bersama perwakilan dari negara-negara pendukung

³² Aqorau, Transform. 2021. *Solomon Islands' Foreign Policy Dilemma and the Switch from Taiwan to China in The China alternative: changing regional order in the Pacific Islands*, by Graeme Smith and Terence Wesley-Smith (eds). Canberra: Australian National University Press

³³ *Ibid*

Taiwan lainnya mulai menginisiasi pembahasan perihal isu kedaulatan Taiwan dalam agenda *General Assembly United Nations* (UN). Program pemerintah hingga aktivitas masyarakat Kepulauan Solomon dari segala sektor semakin bergantung pada distribusi pendanaan dari Taiwan. Bahkan pada tahun 2008, federasi sepak bola Kepulauan Solomon meminta pendanaan sebesar 30 ribu USD dari Pemerintah Taiwan guna mendanai keikutsertaannya dalam turnamen sepak bola tingkat Oceania. Royalti pendanaan dari Taiwan tidak dipungkiri menjadi kunci di balik kesetiaan Kepulauan Solomon mendukung kemerdekaan Taiwan selama lebih dari 36 tahun.³⁴

Awal hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dan Taiwan cenderung dibangun atas dasar kepentingan politik dan ekonomi elit yang dalam beberapa hal justru merugikan publik Kepulauan Solomon. Maka dari itu alih-alih menciptakan hubungan resiprokal berlandaskan *mutual trust* dan *goodwill*, stabilitas hubungan keduanya bergantung pada sejauh mana intensitas dukungan Taiwan mendanai program elit Pemerintahan Kepulauan Solomon. pendanaan proyek *Constituency Development Fund* (CDF) dari Taiwan menjadi titik krusial bagi keberlangsungan hubungan kedua pihak. Data Transparency Kepulauan Solomon dan *United Nations Democracy Fund* (UNDEF) mencatat bahwa anggaran program CDF tahun 2013 mencapai 36,7 juta USD yang mana sekitar 6,1 juta USD di antaranya didanai Pemerintah Taiwan. Pada tahun 2015 estimasi budget CDF berkisar 32 juta USD, dialokasikan dalam berbagai program pembangunan mulai dari infrastruktur

³⁴ *Ibid*

sanitasi, kelistrikan, kesehatan, dan pendidikan. Sebanyak 8,55 juta USD di antaranya berasal dari dana hibah Pemerintah Taiwan. Lebih lanjut data tersebut memproyeksikan bahwa pada tahun 2017 dari 45,1 juta USD estimasi dana CDF, Pemerintah Taiwan mampu berkontribusi pada kisaran nilai yang sama yakni 8,5 juta USD. Pengabaian terhadap Taiwan dapat mendatangkan konsekuensi berupa berkurangnya sumber pendanaan program pembangunan secara signifikan sekaligus hilangnya salah satu sumber dukungan material bagi aktivitas politik elit pemerintahan Kepulauan Solomon.

Pengakuan terhadap kedaulatan Taiwan, beserta serangkaian manfaat ekonomi yang didapat tidak serta merta membuat Kepulauan Solomon memutuskan sepenuhnya hubungan informal dengan Tiongkok. Sebelum keputusan keberpihakan pada Taiwan, Perdana Menteri Alebua beserta jajaran pemerintahannya intens melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam upaya mengeksplorasi peluang pembukaan hubungan diplomatik di antara kedua pemerintahan. Walaupun berujung kegagalan, relasi Kepulauan Solomon-Tiongkok terpelihara tanpa koneksi diplomatik langsung. Seperti halnya pada dekade 1980-an terdapat *memorandum of understanding* (MoU) terkait *sister city* antara Provinsi Guadalcanal (Kepulauan Solomon) dan Provinsi Guangdong (Tiongkok). Kerjasama tersebut memuat berbagai aspek salah satunya tentang *technical assistance* dan pendanaan terhadap pengembangan *shipbuilding* beserta fasilitas pengolahan produk tuna di kawasan Guadalcanal.³⁵

³⁵ Chevalier, Christopher. 2022. *Understanding 'Solo': A biography of Solomon Mamaloni*. Canberra: Australian National University

Sejak saat itu kerjasama bidang ekonomi di antara keduanya berkembang signifikan terutama menyangkut bidang perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Tanpa relasi formal, Kepulauan Solomon berada di urutan teratas sebagai destinasi utama bagi produk ekspor dari Tiongkok di Pasifik Selatan. Begitupun sebaliknya, 90% hasil alam Kepulauan Solomon menyuplai tumbuh kembang industri industri di Tiongkok sejak masa awal reformasi ekonomi.³⁶

Kendati tidak memiliki hubungan diplomatik, data menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan partner perdagangan terpenting bagi perekonomian Kepulauan Solomon. Data *Asian Development Bank* mencatat nilai ekspor ke Tiongkok pada tahun 2008 telah mencapai 200 juta USD. Angka tersebut kemudian meningkat signifikan hingga pada kisaran 360 juta USD pada tahun 2013. Sebaliknya, data yang sama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 nilai impor Kepulauan Solomon dari Tiongkok ialah sebesar 40 juta USD, atau berada di urutan ketiga setelah Australia dan Singapura. Hubungan kedua negara semakin dekat selaras volume perdagangan yang kian meningkat. Data World Bank (2023) memperkirakan bahwa pada tahun 2017 nilai perdagangan di antara keduanya telah mencapai kisaran 647,5 juta USD. Sementara setahun berselang Kepulauan Solomon dan Tiongkok mencatatkan nilai perdagangan hingga 747,5 juta USD. Sebagian besar arus perdagangan tersebut didominasi produk raw materials seperti kayu, bahan tambang, dan perikanan yang banyak ditemukan di wilayah Kepulauan Solomon.

³⁶ Nick Sas (2024) Solomon Islands' pro-China leader Manasseh Sogavare withdraws from race to be next prime minister, diakses pada <https://www.abc.net.au/news/2024-04-29/solomon-islands-manasseh-sogavare-to-step-down-as-pm-candidate/103781462> tanggal 12 Juli 2024

Keputusan Kepulauan Solomon (diikuti Kiribati) beralih mendukung Tiongkok menjadi kekalahan besar bagi pihak Taiwan. Tersisa hanya empat dari empat belas PICs yang tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan Taiwan. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Kepulauan Solomon tergolong kekuatan regional utama sekaligus sekutu strategis bagi Taiwan di Pasifik Selatan. Sampai tahun 2019, Kepulauan Solomon tetap menjadi negara penerima bantuan luar negeri terbesar dari Taiwan.³⁷

Sebagai timbal balik, Pemerintah Kepulauan Solomon konsisten mendukung keikutsertaan Taiwan dalam setiap agenda internasional bahkan hingga di titik terakhir sebelum keputusan peralihan diplomatik terealisasikan. Keputusan Kepulauan Solomon (diikuti Kiribati) beralih mendukung Tiongkok merupakan kekalahan besar bagi pihak Taiwan. Tersisa hanya empat dari empat belas PICs yang tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan Taiwan, di antaranya Nauru, Tuvalu, Marshall Islands, dan Palau. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Kepulauan Solomon merupakan salah satu PICs terbesar sekaligus menjadi sekutu strategis bagi Taiwan di kawasan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwasanya sampai tahun 2019, Kepulauan Solomon tetap menjadi negara penerima bantuan luar negeri terbesar dari Taiwan.³⁸

Sebagai timbal balik, Pemerintah Kepulauan Solomon konsisten mendukung keikutsertaan Taiwan dalam setiap agenda internasional bahkan hingga di titik terakhir sebelum keputusan peralihan diplomatik terealisasikan.

³⁷ Zhang, Denghua, 2019. "*Comparing China and Taiwan Aid to Pacific*". Di akses pada https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/186125/1/ib_2019_20_zhang_final.pdf tanggal 14 Juli 2024

³⁸ *Ibid*

Maka dari itu menyusul manuver diplomatik tersebut, pemerintah Taiwan menyatakan kekecewaan besarnya. Bahwasanya dukungan signifikan yang diberikan masyarakat bagi Kepulauan Solomon pada akhirnya tidak diikuti komitmen dan konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Taiwan.³⁹

Sebaliknya bagi Tiongkok, *diplomatic switch* Kepulauan Solomon merefleksikan keberhasilan implementasi kebijakan luar negerinya di Pasifik Selatan. Kehadiran Tiongkok memang meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir, memperlihatkan bahwa walaupun terdiri dari negaranegara kecil Pasifik Selatan adalah wilayah strategis bagi kepentingan nasional dan internasional Tiongkok. Kunjungan langsung Premier Wen Jiabao ke Fiji pada tahun 2006 menjadi turning point bagi babak baru relasi Sino-Pacific. Bersamaan inisiasi program *China-Pacific Islands Countries Economic Development Cooperation Ministerial Conference*, pihak Tiongkok menegaskan adanya komitmen yang lebih besar membantu agenda pembangunan sosial-ekonomi di kawasan. Hal ini menghasilkan implikasi langsung berupa peningkatan intensitas bantuan luar negeri, investasi, dan perdagangan melalui skema kerjasama bilateral bersama masing-masing PICs maupun dalam kerangka multilateralisme regional. Dewasa ini Tiongkok memantapkan posisinya sebagai secondary regional power yang memiliki relasi dan kontribusi penting di kalangan PICs. Terlihat terdapat dua kali kunjungan langsung Xi Jinping ke Fiji dan Papua Nugini pada tahun 2014 dan 2018.

³⁹ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Cooperation between China and the Pacific Islands Countries. Diakses pada https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html tanggal 14 Juli 2024

Sejak saat itu, kunjungan balasan dari pimpinan PICs “aliansi” Tiongkok ke Beijing juga terbilang intens dan menghasilkan berbagai bentuk peningkatan kerjasama bilateral dan regional. Masing-masing pihak kemudian menyepakati peningkatan status relasi diplomatik dari *friendly and cooperative relations* menjadi *comprehensive strategic partnership* bersama Pemerintah Tiongkok. Delapan pemerintah PICs kemudian menandatangani MOU penerapan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang mana Kawasan Pasifik Selatan menjadi bagian dari rancangan *21st Maritime Silk Road Tiongkok*.

Perpindahan relasi diplomatik menjadi basis penguatan hubungan baik Kepulauan Solomon dan Tiongkok yang selama ini telah berlangsung di luar kerangka *government to government*. Babak baru hubungan Kepulauan Solomon-Tiongkok ditandai kunjungan langsung Perdana Menteri Sogavare ke Beijing pada Oktober 2019. Kedua pemerintahan kemudian meresmikan hubungan diplomatik sekaligus penandatanganan integrasi Kepulauan Solomon dalam skema pembangunan BRI. Dalam pertemuannya langsung dengan Xi Jinping dan Li Keqiang, dua pimpinan tertinggi Tiongkok, PM Sogavare menyatakan komitmen besar negaranya untuk patuh terhadap prinsip *One China* sesuai kesepakatan *UN Assembly*.

Selain itu, dengan terbangunnya relasi diplomatik langsung, pihak Kepulauan Solomon mengharapkan peningkatan aktivitas perdagangan serta lebih banyak lagi keterlibatan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam proses pembangunan ekonomi dan iklim bisnis di wilayah Kepulauan Solomon.⁴⁰

⁴⁰ Ibid

Termasuk di dalamnya menggantikan Taiwan sebagai kontributor utama bagi keberlangsungan program *constituency development funds*.

Hubungan diplomatik memungkinkan Kepulauan Solomon dan Tiongkok mengeksplorasi lingkup kerjasama lain di luar ranah ekonomi, perdagangan, dan bisnis. Seperti halnya di tengah gelombang pandemi, pihak Tiongkok mendukung Kepulauan Solomon dalam bentuk *technical assistance*, bantuan pendanaan, dan suplai peralatan medis secara langsung (Kepulauan Solomon Government 2020). Dewasa ini, hubungan Kepulauan Solomon dan Tiongkok bahkan mulai merambah bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan laporan Powless, kedua pemerintahan telah menyepakati fakta pertahanan bilateral, memungkinkan Tiongkok dalam mengerahkan kekuatan pertahanan dan keamanannya di kawasan. Terdapat beberapa poin krusial terkait perjanjian tersebut di antaranya, bantuan Tiongkok dalam memperkuat kapasitas keamanan nasional Kepulauan Solomon. Kedua pemerintahan juga menyepakati kerjasama bidang humanitarian, respon bencana alam, dan *maintaining social order*. Maka dari itu Pemerintah Kepulauan Solomon memperbolehkan kunjungan kapal perang dan elemen logistik pertahanan Tiongkok lainnya sebagai realisasi pakta pertahanan.

3.2 Kerja sama Taiwan di Kepulauan Solomon

Dalam kerja samanya dibandingkan dengan Kepulauan Solomon, Taiwan lebih fokus pada memberikan bantuan teknis di sektor pertanian, kesehatan, dan infrastruktur skala kecil sampai menengah. Melalui *The International Cooperation and Development Fund (ICDF)* Taiwan. Taiwan

berkomitmen agar memperkuat pertumbuhan sosio-ekonomi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan kerjasama ekonomi bersama negara mitra. Berdasarkan laman resmi ICDF pemerintah Taiwan, bantuan teknis difokuskan pada 4 bentuk:

- Pinjaman dan investasi
- Kerjasama teknis
- Bantuan kemanusiaan
- Pendidikan dan pelatihan internasional. Pinjaman dan Investasi untuk Daerah Terpencil

1. Pinjaman Dan Investasi untuk Daerah Terpencil

Rural Credit Project menggelontorkan pinjaman sebanyak \$2 juta dolar terhadap pemerintah Kepulauan Solomon sejak tahun 1998. Pemerintah Kepulauan Solomon bertanggung jawab dalam terhadap penyaluran dana pinjaman ke Bank Pembangunan Kepulauan Solomon (DBSI). DBSI berperan untuk menjadi perantara Tingkat pertama dalam hal keuangan yang berfungsi untuk meminjamkan dana tersebut Kembali kepada Masyarakat pedesaan, atau dapat juga dikatakan sebagai perantara Tingkat kedua apabila terdapat kelompok sasaran yang berada diluar jangkauan langsung. Berdasarkan pinjaman US \$ 2 juta tersebut, terdapat dua jalur kredit yang dapat dilaksanakan dalam Kredit Pedesaan: US \$ 1,7 juta (85 persen) dapat dimanfaatkan sebagai biaya kegiatan usaha yang dapat digunakan oleh individu, komunitas atau Perusahaan yang terdapat di berbagai daerah pedesaan di seluruh Kepulauan Solomon, yang

mengecualikan Honiara. Proyek tersebut mencakup sektor pertanian, industri, komersial, transportasi, dan jasa. Kredit Produksi Beras Taiwan: US \$ 300.000 (15 persen) diberikan kepada peserta Proyek Produksi Beras Taiwan.⁴¹

Proyek ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah di daerah pelosok di berbagai tempat di Kepulauan Solomon. Potensi dari perkembangan wilayah terhambat karena keterbatasan dana ataupun SDM dalam melaksanakan kegiatan komersial dan produksi. Oleh karena itu, proyek tersebut bertujuan untuk: (1) Memberikan kepada daerah pedesaan jalur kredit jangka menengah dan jangka panjang guna memberikan solusi terhadap permasalahan sumber daya yang menjadi kendala masyarakat pedesaan, dan membantu meningkatkan efisiensi dari pergerakan sumber daya dan memperkuat mekanisme perantara serta alokasi dana pembangunan. (2) Menyediakan kredit terhadap peserta Proyek Produksi Beras Taiwan agar menjaga tingkat produksi dan menambah pendapatan petani yang berada di pedesaan.

2. Kerjasama Teknis

Dengan kerjasama teknis pemerintah Taiwan dan Kepulauan Solomon, pemerintah Taiwan dalam hal ini melakukan kerjasama dengan Menteri Pertanian dan Peternakan Kepulauan Solomon dalam proyek-proyek agrikultural dan peternakan seperti *Integrated Hog-Raising Project, Vegetable And Fruit Improvement, dan Food Crop Improvement*

⁴¹ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Eight Pronged Important Consensus Reached by China and Solomon Islands". In https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202205/t20220527_10693484.html tanggal 14 Juli 2024

Project. Taiwan Technical Mission (TTM) terlibat dalam kerjasama ini.

3. Bantuan Kemanusiaan

Terdapat keunggulan dan kelemahan dalam Pelayanan kesehatan di Kepulauan Solomon. Keunggulan ditunjukkan oleh kinerja sistem kesehatan yang bersifat positif, cakupannya dapat tercapai dengan luas, tingginya tingkat kepuasan, serta peningkatan kondisi setelah perawatan yang stabil. Akan tetapi, peningkatan angka demografis juga memperparah sistem pelayanan kesehatan di Kepulauan Solomon. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peralatan medis, kondisi klinik yang memerlukan renovasi, serta ketidakmerataan petugas kesehatan. Diharapkan hubungan bilateral antara Taiwan dan Kepulauan Solomon dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menghadapi tantangan dalam bidang pelayanan medis di Kepulauan Solomon.⁴²

Melalui *Healthcare Personnel Training Project*, Taiwan mengirim personel medis dari negara mitra setiap tahun dengan tujuan menjalani pelatihan selama 1-3 bulan di rumah sakit di Taiwan. Tujuannya adalah untuk peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan kualitas layanan kesehatan negara mitra. Pada tahun 2016, proyek tersebut mengirimkan 26 personel dari 17 negara. Sedangkan pada tahun 2017, 22 personel dari 12 negara terlibat dalam proyek ini. Pada tahun 2018, tercatat 23 personel dari 10 negara turut serta dalam proyek. Pada tahun 2019, jumlah personel yang terlibat berkurang menjadi 15 dari 9 negara. Universitas dan rumah

⁴² Elman, Miriam Fendius, 2015. "The Foreign Policy of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard" [online]. Diakses pada <http://www.maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Fendius.pdf> tanggal 14 Juli 2024

sakit Taiwan seperti Mackay Memorial Hospital, Kaohsiung Medical University, dan Chi Mei Hospital telah memberikan kontribusi besar dalam pendampingan medis dengan menyediakan alat kesehatan dan mendirikan laboratorium demam berdarah pertama di Kepulauan Solomon.

43

Dalam bidang kekuatan medis serta kontribusinya dalam dunia kesehatan global, Taiwan jauh lebih superior daripada Tiongkok. Dengan melalui sistem asuransi kesehatan universal Taiwan, sistem pelayanan kesehatan dengan jangka panjang, serta teknologi medis Taiwan sebenarnya dapat banyak menyumbangkan kontribusinya terhadap dunia global walaupun dalam praktiknya sering tidak diakui oleh masyarakat internasional disebabkan konflik politik. Berdasarkan indeks pelayanan kesehatan Bloomberg pada tahun 2018, Taiwan menempati peringkat kesembilan yang didasarkan pada angka harapan hidup dan biaya kesehatan, yang telah melampaui Amerika Serikat di peringkat 26 dan Tiongkok berada di peringkat 20. Berdasarkan situasi tersebut, dapat menganggap bahwa kekuatan lunak terbesar Taiwan terletak pada pelayanan medis dan kesehatan, yang juga dipromosikan oleh PBB dalam isu kemanusiaan dan keilmuan.⁴⁴

4. Pendidikan dan Pelatihan Internasional

Berdasarkan *International Higher Education Scholarship*

⁴³ Elman, Miriam Fendius, 2015. "The Foreign Policy of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard" [online]. Diakses pada <http://www.maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Fendius.pdf> tanggal 14 Juli 2024

⁴⁴ *Ibid*

Program, Taiwan menggelontorkan beasiswa terhadap pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di 21 universitas Taiwan melalui 31 program gelar sarjana, master, dan doktor. Program beasiswa tersebut menyediakan biaya penuh yang meliputi tiket pulang pergi, tempat tinggal, biaya pendidikan, asuransi, biaya buku, dan uang bulanan. Program itu telah dilakukan sejak tahun 1998, sebanyak 2.000 pelajar asing yang telah menempuh pendidikan di Taiwan melalui beasiswa Taiwan ICDF. Pada tahun 2019, terdapat siswa internasional dari Kepulauan Solomon yang berjumlah 125, di mana 86 siswa mendapat beasiswa dari pemerintah Taiwan. Terdapat *tagline* resmi yang terdapat dalam video yang dibuat oleh penerima beasiswa Taiwan ICDF, Taiwan memakai slogan "*Changing the World through Seeds of Hope*" hal tersebut menegaskan peran penting pendidikan dalam menciptakan SDM yang memiliki kualitas dan mampu menciptakan perubahan dalam skala global yang bersifat berkelanjutan. Selain beasiswa tersebut, melalui kekuatan *soft power* yang digunakan oleh Taiwan terhadap Kepulauan Pasifik dengan di bentuknya forum multilateral dengan topik *Pacific Islands Leadership Program with Taiwan* (PILP).

Program Indonesia Leadership Program (PILP) Dimulai sejak tahun 2013 ditujukan kepada pekerja profesional berusia 25-38 tahun. Mereka akan melakukan Upaya peningkatan pengalaman belajar di berbagai kampus *East-West Center* di Honolulu, Hawai'i yang berlangsung selama 1 bulan, dan melanjutkan program *Taiwan's Institute*

of Diplomatic and International Affairs (IDIA Taiwan) selama 6 minggu di kantor tersebut. Program tersebut hanya tersedia bagi penduduk yang terdapat di Kepulauan Pasifik yang tertarik dalam pelatihan kepemimpinan serta siap untuk memajukan perdamaian dan kemakmuran di wilayah Pasifik, termasuk Kepulauan Cook, Kepulauan Solomon, Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Polinesia Perancis, Republik Marshall, Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Program di atas memiliki tujuan agar mampu memperkuat pengetahuan serta pemahaman bagi peserta yang mengikutinya dalam hal ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan juga isu lingkungan secara global yang kemudian mempengaruhi Kepulauan Pasifik-Asia Amerika, yang pada akhirnya bisa di manifestasikan dan memberikan kontribusi yang penting bagi perkembangan wilayah tersebut dengan pekerjaan yang mereka lakukan masing-masing. Program tersebut menawarkan kelebihan sebagai berikut:

- Uang saku yang akan digunakan selama program tersebut berlangsung.
- Biaya tempat tinggal peserta program.
- Asuransi kesehatan peserta.
- Materi pembelajaran yang akan diberikan oleh tenaga pengajar.
- Biaya hidup
- Tiket pesawat ke Honolulu Tiket pesawat Honolulu-Taipei
- Tiket pesawat dari Taipei ke negara masing-masing
- Biaya visa SEVIS Pada tahun 2018, sebanyak 144 pemimpin muda dari

Pasifik mengikuti program tersebut, termasuk peserta dari 8 negara Kepulauan Pasifik yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok.⁴⁵

5. Demokrasi dan HAM

Taiwan menganut ideologi politik yang di anut oleh Taiwan sangat dekat kaitannya dengan nilai demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, hal tersebut secara langsung tidak sesuai terhadap ideologi politik Tiongkok berupa komunisme. Ketika merayakan berdirinya partai komunis Tiongkok yang ke-70, Presiden Tsai Ing wen secara langsung menyuarakan kecamannya terhadap kediktatoran Tiongkok daratan dan ekspansi militernya yang "mengancam perdamaian regional dan demokrasi serta peradaban dunia secara serius". Tsai menyatakan, *We are a country of democracy and freedom and will show support for anyone in the world who pursues democracy and freedom*" menegaskan komitmen Taiwan untuk mempromosikan nilai demokrasi dan menghormati hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya. *Soft power* Taiwan dalam demokrasi dan HAM sejalan dengan nilai perdamaian melalui agama yang diusung Kepulauan Solomon.⁴⁶

3.3. Hubungan Tiongkok dan Kepulauan Solomon

Hubungan antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus utama pada kerja sama

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Karambelkar, Amruta, 2022. "The China-Solomon Islands Bilateral Security Pact". Diakses pada <https://www.vifindia.org/sites/default/files/The-China-Solomon-Islands-Bilateral-Security-Pact.pdf> tanggal 14 Juli

ekonomi dan pembangunan. Tiongkok telah menjadi mitra penting bagi Kepulauan Solomon, menawarkan bantuan pembangunan, investasi infrastruktur, dan perdagangan yang semakin meningkat. Salah satu aspek utama dari hubungan ini adalah proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, yang telah membantu meningkatkan kualitas hidup di negara kepulauan tersebut.

Kerjasama ekonomi antara kedua negara juga terlihat dalam perdagangan bilateral, di mana Kepulauan Solomon mengekspor produk-produk pertanian dan perikanan ke Tiongkok, sementara Tiongkok menyediakan berbagai barang manufaktur yang penting bagi perekonomian Kepulauan Solomon. Selain itu, bantuan teknis dan pendidikan dari Tiongkok, seperti beasiswa untuk mahasiswa Kepulauan Solomon, telah memperdalam hubungan sosial dan budaya antara kedua negara. Dari perspektif geopolitik, hubungan ini juga mencerminkan peran Tiongkok yang semakin besar di kawasan Pasifik. Tiongkok melihat Kepulauan Solomon sebagai bagian dari upayanya untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut, yang strategis baik dari segi ekonomi maupun politik. Di sisi lain, Kepulauan Solomon memandang Tiongkok sebagai mitra yang dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, hubungan ini tidak lepas dari tantangan. Ada kekhawatiran di kalangan masyarakat dan komunitas internasional tentang potensi ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada Tiongkok, yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan independensi keputusan politik di Kepulauan Solomon. Meskipun demikian,

kedua negara terus memperdalam kerja sama mereka, dengan fokus pada keuntungan bersama dan saling pengertian. Secara keseluruhan, hubungan Tiongkok dan Kepulauan Solomon mencerminkan dinamika yang kompleks antara kerja sama ekonomi, pembangunan, dan pengaruh geopolitik. Kedua negara tampaknya berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan ini, sambil menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di masa depan.⁴⁷

3.4. Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dengan Tiongkok

Peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019 merupakan peristiwa signifikan yang menggambarkan dinamika geopolitik di kawasan Pasifik. Sebelum peralihan tersebut, Kepulauan Solomon, seperti beberapa negara lain di Pasifik, memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, yang dianggap sebagai bagian dari strategi Taiwan untuk mempertahankan pengakuan internasionalnya di tengah tekanan dari Tiongkok. Namun, perubahan itu terjadi ketika pemerintah Kepulauan Solomon, di bawah Perdana Menteri Manasseh Sogavare, memutuskan untuk memutus hubungan dengan Taiwan dan mengalihkan pengakuan resminya ke Tiongkok.⁴⁸

Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor, yang paling menonjol adalah janji-janji investasi dan bantuan pembangunan dari Tiongkok. Sebagai salah satu negara terkecil dan paling kurang berkembang di kawasan Pasifik, Kepulauan Solomon menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk infrastruktur yang terbatas, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dalam konteks ini, tawaran Tiongkok untuk menyediakan bantuan

⁴⁷ Zhang, D. (2021). *China–Pacific Tourism Engagement: Opportunities and Challenges*.

⁴⁸ *Op.cit.* Zhang, D. Hal.25

ekonomi yang signifikan, termasuk proyek-proyek infrastruktur besar, sangat menarik bagi pemerintah Kepulauan Solomon. Tiongkok menjanjikan pembangunan di berbagai sektor seperti transportasi, energi, dan pendidikan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Selain alasan ekonomi, keputusan ini juga mencerminkan strategi geopolitik Tiongkok di kawasan Pasifik. Tiongkok telah secara aktif berupaya untuk mengkonsolidasikan pengaruhnya di wilayah ini, terutama dengan menargetkan negara-negara yang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dengan berhasil menarik Kepulauan Solomon ke kubu diplomatiknya, Tiongkok berhasil melemahkan posisi Taiwan di kancah internasional, mengingat Kepulauan Solomon adalah salah satu dari sedikit negara yang masih mengakui Taiwan pada saat itu. Peralihan ini juga menimbulkan kontroversi baik di dalam negeri maupun di kalangan komunitas internasional. Di dalam negeri, ada perdebatan tentang apakah langkah ini benar-benar akan menguntungkan negara dalam jangka panjang, atau justru akan meningkatkan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, yang dapat mempengaruhi kedaulatan politik Kepulauan Solomon.⁴⁹ Di tingkat internasional, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Pasifik, memandang langkah ini dengan keprihatinan, khawatir bahwa peningkatan pengaruh Tiongkok dapat mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon tetap teguh dengan

⁴⁹ *Ibid. Zhang, D. Hal 25.*

keputusannya, dengan menekankan bahwa langkah ini adalah demi kepentingan terbaik negara untuk mengamankan masa depan ekonomi yang lebih baik. Dalam beberapa tahun sejak peralihan, berbagai proyek kerja sama antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok telah mulai terwujud, meskipun dampak jangka panjang dari hubungan ini masih terus dipantau. Secara keseluruhan, peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon ke Tiongkok adalah cerminan dari bagaimana negara-negara kecil di kawasan Pasifik menavigasi tekanan antara kekuatan besar dunia. Keputusan ini menunjukkan bagaimana pertimbangan ekonomi dan geopolitik dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, dan bagaimana Tiongkok semakin memainkan peran dominan dalam politik global, terutama di wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai zona pengaruh kekuatan Barat.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PERALIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK KEPULAUAN SOLOMON DARI TAIWAN KE TIONGKOK

4.1 Analisis Peralihan Kepulauan Solomon ke Tiongkok

Keputusan Pemerintah Kepulauan Solomon beralih mendukung Tiongkok dihasilkan dari perhitungan rasional mengenai potensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila tergabung dalam Blok-Tiongkok dibandingkan Taiwan. Selama lebih dari tiga puluh tahun menjalin relasi formal dengan Taiwan, pihak Kepulauan Solomon sejatinya telah mendapatkan manfaat yang terbilang signifikan.

Tiongkok sendiri membangun pengaruhnya di dunia internasional melalui berbagai bidang seperti ekonomi dan perdagangan, politik, keamanan, budaya dan sebagainya. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun relasi dengan berbagai negara di dunia untuk mencapai visinya untuk menjadi negara adidaya di dunia internasional. Salah satu yang dilakukan Tiongkok adalah dengan melakukan ekspansi dengan menggunakan jalur laut yang dilakukan melalui Laut Cina Selatan dan membangun berbagai relasi dengan negara-negara kepulauan. Tiongkok adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia disamping Amerika Serikat sehingga mampu untuk memperkuat hegemoni di berbagai negara melalui kekuatan ekonomi⁵⁰.

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara dengan luas wilayah dan populasi yang kecil juga. Negara-negara tersebut memiliki kecenderungan konflik disebabkan berbagai hal

⁵⁰ Alfi, Raihan dkk. (2023). Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara. *Jurnal Transborders*: Vol. 7 (1) hal 1-14.

seperti ekonomi yang lemah, ketidakstabilan politik dalam negeri, konflik ras dan sebagainya. Oleh sebab negara-negara adidaya berlomba untuk menunjukkan pengaruhnya melalui berbagai kerja sama melalui bantuan ekonomi dan keamanan. Seperti Australia yang merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di kawasan Asia Pasifik. Disisi lain, pengaruh Australia menjadi terancam dengan kehadiran Tiongkok yang menjadikan Asia Pasifik sebagai salah satu sasaran utama dalam memperkuat hegemoninya di dunia internasional⁵¹.

Kepulauan Solomon sendiri menjadi salah satu target utama Tiongkok dalam menjalin kerjasama. Bukan hanya persoalan keuntungan ekonomi namun juga politik terhadap Taiwan. Kepulauan Solomon memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan selama 36 tahun yang berarti tidak mengakui kebijakan Tiongkok yakni 'Satu Daratan Cina'. Hal tersebut merupakan topik yang sangat sensitif bagi Tiongkok sebagai sebuah negara, sehingga menjalin hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon merupakan langkah yang sangat besar bagi Tiongkok dalam memperbesar pengaruhnya di dunia internasional sekaligus memperkuat kebijakan 'Satu Daratan Cina'.⁵²

Berdasarkan himpunan data *Pacific Aid Maps* dalam rentang tahun 2008-2021, Kepulauan Solomon menjadi Negara-negara Pasifik Selatan (PICs) penerima ODA terbesar dari Taiwan. Tercatat dari 497,6 juta USD keseluruhan ODA Taiwan di Pasifik Selatan pada periode tersebut, sebanyak 27,5% atau

⁵¹ Nadjiha, Siti (2020). Persaingan Cina Australia dalam Perebutan Pengaruh di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Asia Pasific Studies*: vol. 4 (1) hal 33-45.

⁵² Putri, Adinda Normala (2020). Persaingan Pengaruh di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok. *Jurnal Asia Pasifik Studies*: Vol. 3 (2) hal 130-144.

137,22 juta USD diperuntukkan bagi Kepulauan Solomon. Besarnya dana bantuan Taiwan tersebut dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Sebagian besar berwujud bantuan teknis dalam meningkatkan produktivitas sektor agrikultur dan perikanan lokal serta perbaikan kesehatan dan Pendidikan masyarakat setempat. Namun tidak sedikit pula yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik penunjang aktivitas perekonomian lokal Kepulauan Solomon.⁵³

Bantuan-bantuan tersebut merupakan salah satu upaya Taiwan untuk mempertahankan eksistensinya di dunia Internasional. Pertumbuhan Tiongkok sebagai salah satu negara adidaya di dunia internasional merupakan ancaman bagi Taiwan sehingga pengakuan negara lain terhadap mereka yang merupakan salah satu syarat dibentuknya sebuah negara adalah sesuatu yang krusial. Namun dalam praktiknya, Tiongkok menjadi sangat diperhitungkan di dunia internasional yang membuat negara-negara lain sulit untuk berlawanan secara politik dengan Tiongkok yang menjadi hambatan tersebar Taiwan dalam kancha dunia internasional saat ini.

Pertimbangan keuntungan ekonomi menjadi poin krusial bagi *less developed state* seperti Kepulauan Solomon dan PICs lainnya dalam menentukan afiliasi politik internasionalnya. Terkait hal ini, besarnya komitmen dan kontribusi Tiongkok terhadap pembangunan Kawasan dewasa ini tidak dipungkiri menjadi alasan pokok di balik keputusan Kepulauan Solomon mengakhiri dukungan diplomatiknya bagi Taiwan. Terdapat empat

⁵³ Batley, James, 2016. "Constituency Development Funds in Solomon Islands". Diakses pada https://dpa.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2016-07/ib2015.67_batley.pdf tanggal 15 Juli 2024

alasan yang melandasi keputusan Pemerintah Kepulauan Solomon

Pertama, realita bahwa Tiongkok merupakan partner perdagangan utama Kepulauan Solomon. Tercatat pada data *World Bank*,⁵⁴ pada tahun 2018 keduanya mencatatkan nilai ekspor-impor sebesar 748 juta USD Dimana pihak Kepulauan Solomon mendapatkan keuntungan surplus perdagangan hingga mencapai 512 juta USD dari penjualan bahan tambang, perikanan, dan sumberdaya kehutanan ke Tiongkok. Produk keuntungan yang didapatkan Kepulauan Solomon yaitu dari adanya penjualan bahan tambang, perikanan, dan sumberdaya kehutanan ke Tiongkok.⁵⁵

Kepulauan Solomon menitik beratkan perdagangannya pada Tiongkok karena keadaan pasar besar yang dimiliki Kepulauan Solomon, memiliki potensi alam yang besar yang dapat dimanfaatkan dalam perdagangan internasional yang dijalankan. Sebagai salah satu mitra yang juga mendapat bantuan ekonomi dari Tiongkok, Kepulauan Solomon mengirim banyak sekali potensi alamnya ke Tiongkok salah satunya adalah Cadangan biji besi yang melimpah di dalam negeri. Tiongkok, merupakan negara yang sangat membutuhkan banyak sumber daya alam karena masifnya pembangunan yang dilakukan dalam negeri serta pembangunan diluar negara Tiongkok lewat investasi berupa pembangunan yang dilakukannya diberbagai negara mitra ekonomi dan penerima bantuan Pembangunan dari Tiongkok.

Di sisi Kepulauan Solomon, hasil alam kehutanan yang dimiliki banyak

⁵⁴ World Bank (2022) International Debt Statistics 2022, diakses pada <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/2d6b3d72-a763-5db8-bd8b-209a6a7fb384/content> tanggal 24 September 2024.

⁵⁵ OEC (2022) Solomon Islands-China Bilateral, diakses pada <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slb/partner/chn>, tanggal 24 September 2024

dikirim ke Tiongkok untuk berbagai kebutuhan industri yang dimiliki di Tiongkok. Produk yang paling besar yang dikirim Kepulauan Solomon ke Tiongkok adalah produk kayu kasar. Kayu kasar pada dasarnya digunakan oleh Tiongkok untuk industri kertas yang dimiliki dalam negeri. Kayu kasar yang dikirim memiliki bernilai 258 Juta Dollar Amerika Serikat. Selain itu, Buah dan kacang olah merupakan salah satu produk yang dikirim pula ke Tiongkok. Tingkat ekspor olahan buah dan kacang ini bernilai 1,69 juta dollar Amerika Serikat.⁵⁶

Sebelum peralihan hubungan Diplomatik, ditahun 2017 tingkat ekspor yang dimiliki oleh Kepulauan Solomon ke Tiongkok hanya tercatat 260 Juta dollar, tetapi pasca peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon sukses meningkatkan pasar yang dimiliki di Tiongkok dengan angka 524 juta Dollar Amerika Serikat.⁵⁷ Hal tersebut menunjukkan bawah pengaruh hubungan diplomatik yang dilakukan Tiongkok dan Kepulauan Solomon memberikan dampak ekonomi dalam bidang ekspor-impor menguntungkan bagi kedua negara. Tiongkok merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga memiliki kebutuhan terhadap sumber daya yang besar pula. Oleh sebab itu, pola hubungan ini akan menguntungkan pada aspek peningkatan ekonomi bagi Kepulauan Solomon.

Peralihan hubungan diplomatik yang dilakukan menambah kesempatan pada Kepulauan Solomon dalam meningkatkan tingkat perdagangannya di tengah tantangan dalam meninggalkan Taiwan setelah berpuluh tahun

⁵⁶ *Ibid*

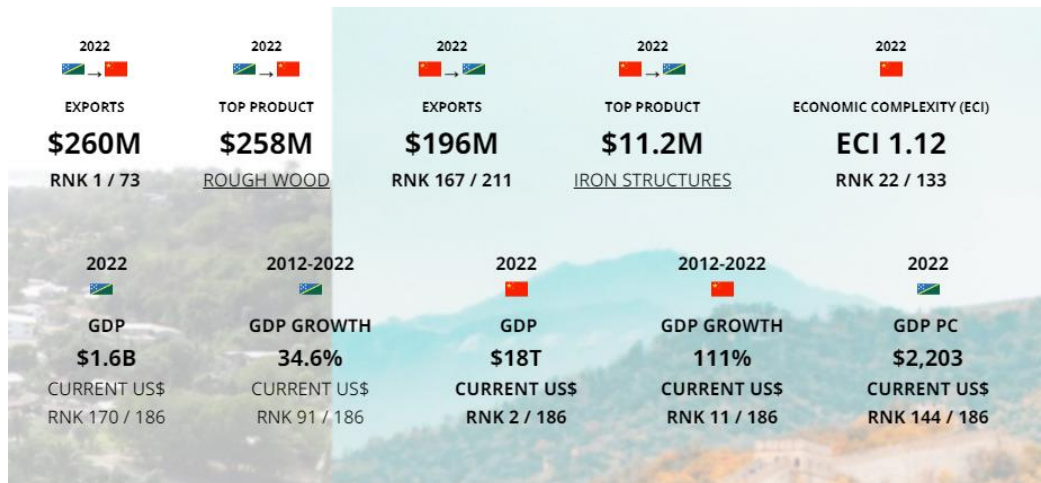
⁵⁷ *Ibid*

membangun Hubungan Diplomatik dan menerima berbagai bantuan dari Taiwan. Dalam negeri Kepulauan Solomon mendapatkan kesempatan untuk memiliki berbagai pilihan produk dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dimiliki setelah berbagai potensi alam yang dimiliki dapat berkembang dan menambah devisa negara.

Ekspor Kepulauan Solomon mengalami peningkatan signifikan setelah peralihan kubu ke Tiongkok. Hal ini didukung oleh Tiongkok dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sekaligus negara dengan peningkatan industri yang cepat, membutuhkan impor yang besar terhadap beberapa bahan mentah. Contohnya adalah tahun 2022, nilai impor Kepulauan Solomon ke Tiongkok mencapai \$258 juta dolar yang mana mayoritas dari ekspor tersebut berupa kayu kasar⁵⁸.

⁵⁸ OEC (2022) 'Solomon Island-China' OEC: dapat diakses di <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slb/partner/chn> pada 4 Oktober 2024.

Gambar 1 Jumlah data yang di Ekspor-Import Kepulauan Solomon dan Tiongkok.



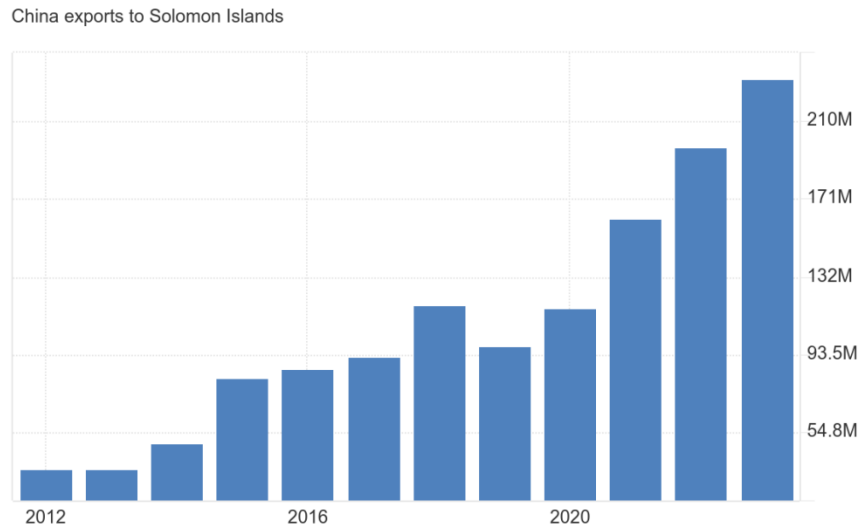
Sumber: <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slb/partner/chn>

Sebagai negara yang sedang melakukan Pembangunan secara massif, Kepulauan Solomon menerima manfaat pula lewat produk impor yang di miliki yakni struktur besi 11,2 juta dolar. Hasil pertanian beras yang dimiliki Tiongkok senilai 5,88 juta dollar. Dari produk yang dimiliki Tiongkok, pilihan untuk beralih Hubungan diplomatik dianggap sebagai pilihan yang tepat apalagi Tiongkok merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar di Asia hingga secara global.⁵⁹

Kepulauan Solomon terdiri dari 992 pulau, sehingga terdapat banyak keterbatasan material dalam pembangunan industri. Tiongkok dalam hal ini mengimpor berbagai jenis barang seperti Struktur Besi Besi Gulung Pipih Berlapis, Beras. Tidak dipungkiri bahwa peralihan sekutu dari Taiwan ke Tiongkok memberi dampak besar terkait peningkatan ekspor Tiongkok ke

⁵⁹ *Ibid. Observatory of Economic Complexity (OEC)*

Kepulauan Solomon⁶⁰.



Sumber: tradingeconomics.com

Berdasarkan data di atas, terus terjadi peningkatan nilai ekspor Tiongkok ke Kepulauan Solomon sejak tahun 2019 ketika pemutusan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan yang kemudian beralih kepada Tiongkok. Hubungan tersebut bersifat saling menguntungkan antara kedua negara melihat ekspor yang dilakukan Kepulauan Solomon meningkat yang berbanding lurus dengan penambahan jumlah ekspor Tiongkok.

Taiwan sebagai negara yang ada di Kawasan Asia juga memang dikenal dengan potensi ekonomi, namun secara kesempatan kesejahteraan pilihan kepulauan Solomon mengarahkan diri pada Tiongkok sangat efektif dalam meningkatkan nilai kompleksitas ekonomi yang dimiliki sebagai sebuah negara. Tiongkok sendiri memiliki nilai kompleksitas ekonomi diangka 22 dengan Tingkat ekspor yang sangat besar sehingga dengan bekerjasama dan memiliki

⁶⁰ Trading Economi (2024) 'China Export to Solomon Islands' Trading Economic: dapat diakses di <https://tradingeconomics.com/china/exports/solomon-islands> pada 04 Oktober 2024

hubungan diplomatik Bersama Tiongkok para mitra Tiongkok akan turut bergabung dalam menciptakan peluang baru untuk Kepulauan Solomon dalam perkembangan global politik dan ekonominya.

Dalam hal ini, kerjasama dengan Tiongkok akan lebih menguntungkan disebabkan Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dan sedang melakukan berbagai upaya Politik Luar Negeri untuk menetapkan pengaruhnya sehingga akan melakukan berbagai hal untuk mendapatkan kesepakatan dengan negara-negara lain. Kepulauan Solomon yang lemah secara ekonomi juga tidak terlepas dari upaya tersebut yang dibuktikan dengan peningkatan ekspor oleh Tiongkok sehingga akhirnya menjalin kerja sama dengan Tiongkok dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan yang telah dijalin selama puluhan tahun.

Kedua, Tiongkok memberikan dukungan dana bantuan dan investasi yang besar kepada Solomon. Dengan beralih mendukung Tiongkok, Kepulauan Solomon mengharapkan perolehan dukungan dana bantuan dan investasi yang lebih besar. Bantuan ekonomi yang diberikan Tiongkok sangatlah besar dibandingkan apa yang diberikan Taiwan sepanjang 2001-2021. Sepanjang periode ini, dana implementasi BRI Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan, 2,73 Miliar USD. Sedangkan Taiwan hanya kisaran 250-960 Juta USD saja. Prospek bantuan BRI yang dilakukan Tiongkok mengakibatkan pula Solomon beralih karena Tingkat bantuan ekonomi yang diberikan ini 2 sampai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan Taiwan. Bantuan ekonomi Taiwan pada dasarnya di Kepulauan Solomon hanya tercatat pada angka 138 Juta dollar,

sedangkan Tiongkok jauh melampaui angka tersebut sehingga menambah ketertarikan yang dimiliki Kepulauan Solomon berpindah Haluan Hubungan Diplomatik pada Tiongkok.⁶¹

BRI merupakan proyek Tiongkok yang mana Tiongkok menggelontorkan dana tidak main-main untuk mewujudkan visinya dalam membangun jalur di daratan maupun lautan. Oleh sebab itu, bantuan dana dan investasi yang diberikan Tiongkok terhadap Kepulauan Solomon juga dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini menempatkan Kepulauan Solomon di posisi yang sulit untuk menghindari kerjasama tersebut disebabkan bantuan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi negara mereka. Oleh sebab itu, Tiongkok melakukan pendekatan ekonomi terhadap negara-negara yang kesulitan secara ekonomi seperti negara di kawasan Afrika ataupun Asia Pasifik.

Pada tahun 2019, Kepulauan Solomon dilaporkan mendapatkan bantuan dana sebesar 500 juta US dolar dari pihak Tiongkok dan jauh di atas dari bantuan yang diberikan oleh pihak Taiwan kepada Kepulauan Solomon. Tiongkok juga memberikan memberikan waktu untuk memutuskan hubungan diplomatik sebelum 1 oktober yang merupakan hari kemerdekaan Tiongkok. Dalam menanggapi hal tersebut, Taiwan segera menarik seluruh staff kedutaan mereka yang ada di Kepulauan Solomon untuk kembali terbang ke Taiwan. Hal tersebut juga menandai dengan pengakuan Tiongkok sebagai negara dan berarti mendukung kebijakan 'satu cina' yang menyebabkan Kepulauan Solomon tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara yang sebelumnya mereka akui

⁶¹ *Ibid. Observatory of Economic Complexity (OEC)*

selama 36 tahun.⁶²

Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan Kepulauan Solomon dan Tiongkok membawa dampak yang sangat besar. Bantuan ekonomi dengan nilai yang lebih tinggi kemudian membuat Taiwan kehilangan salah satu sekutu yang mengakui keberadaan mereka sebagai sebuah negara. Upaya diplomasi melalui bidang ekonomi dalam hal ini bantuan pinjaman dan investasi yang dilakukan Tiongkok terbukti sangat mempengaruhi posisi mereka di duni internasional secara ekonomi ataupun politik.

Pada tahun 2024, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele menghadiri pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing yang membahas terkait Tiongkok akan menopang anggaran pemerintahan dengan memberikan suntikan dana sebesar \$20 juta USD terhadap Kepulauan Solomon. Sejak melakukan peralihan dari Taiwan ke Tiongkok, Tiongkok memberikan bantuan tidak main-main terhadap Kepulauan Solomon. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan stadion baru berskala besar di ibu kota Honiara, fasilitas kesehatan canggih, menara telepon seluler, jalan raya dan sebagainya. Pada pertemuan itu Tiongkok juga menjanjikan bantuan investasi terhadap perluasan satu-satunya bandara internasional di Kepulauan Solomon yaitu Manele⁶³.

Ketiga, pihak Tiongkok juga terlihat berpartisipasi aktif dalam menyuplai

⁶² Natalie Whiting, Christina Zhou, Kai Feng. 2019. 'What does it take for China to take Taiwan's Pacific allies? Apparently, \$730 million' diakses di <https://www.abc.net.au/news/2019-09-18/solomon-islands-cuts-ties-with-taiwan-in-favour-of-china/11524118> pada 30 September 2024.

⁶³ VOA Indonesia (2024) "China Gelontorkan \$20 Juta untuk Kepulauan Solomon" VOA Indonesia: dapat diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/china-gelontorkan-20-juta-untuk-kepulauan-solomon/7700132.html> pada 1 Oktober 2024

kebutuhan material Kepulauan Solomon di masa pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 merupakan hantaman bagi seluruh negara di dunia. Pandemi tersebut menyebabkan kerugian di berbagai faktor terutama di bidang ekonomi. Seluruh negara mengalami kerugian besar termasuk negara-negara dengan perekonomian stabil, namun tentu saja dampak terbesar dari pandemi sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi mumpuni⁶⁴. Contohnya adalah Kepulauan Solomon, dalam hal ini hubungan diplomatik yang terjalin dengan Tiongkok menjadikan landasan kuat atas pemberian bantuan yang dilakukan Tiongkok terhadap Kepulauan Solomon.

Diantaranya pada awal April tahun 2020, Pemerintah Tiongkok memberikan dana hibah sebanyak 2,8 juta USD beserta *Technical Assistance* dan peralatan kesehatan guna meningkatkan kapabilitas dan kapasitas otoritas kesehatan setempat menghadapi ancaman pandemi.⁶⁵ Memasuki masa *Global Recovery* pada tahun 2021, Tiongkok bertindak sebagai penyuplai vaksin utama bagi masyarakat Kepulauan Solomon. Sementara bantuan dana dan kelengkapan medis lainnya masih dilakukan secara konsisten. Puncaknya pada tahun 2022, Tiongkok kembali memberikan dana bantuan sebesar 350 ribu USD guna menstimulus perbaikan perekonomian Kepulauan Solomon pasca pandemi.⁶⁶

⁶⁴ Oktavia, Kinanti dkk (2023) Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian setiap Negara Menggunakan Python. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan: Vol 9 (20) hal 425-436.

⁶⁵ Solomon Islands Government, 2020. "PRC Hands 2,5 million USD in Cash to Fight Covid-19". Diakses pada <https://solomons.gov.sb/prc-hands2-5m-in-cash-grant-to-fight-covid-19/> tanggal 15 Juli 2024

⁶⁶ Global Times, 2022. "Chinese Aircraft Arrived in Solomon Islands with Anti Epidemic

Bantuan kesehatan sangat dibutuhkan oleh berbagai negara ketika Covid 19 terjadi. Negara seperti Kepulauan Solomon mengalami keterbatasan pendanaan apalagi pengaruh pandemi yang semakin memperburuk perekonomian negara tersebut. Oleh sebab itu, bantuan yang digontorkan oleh Tiongkok sangat membantu negara dalam mengatasi permasalahan Covid 19 yang saat melanda seluruh dunia dan menjadi masalah global. Tiongkok dengan Wuhan sebagai titik awal terjadinya pandemi menjadikan peningkatan citra buruk terhadap Tiongkok oleh masyarakat internasional. Namun bantuan dana tersebut dapat mempengaruhi perubahan citra Tiongkok sebagai negara yang aktif dalam memberikan bantuan dana terutama bagi Kepulauan Solomon yang pada saat itu baru saja beralih dari Taiwan ke Tiongkok.

Ditengah peralihan yang belum lama dilakukan oleh Kepulauan Solomon ke Tiongkok, bantuan besar Tiongkok pasca Covid 19 sangat besar dampaknya pada Kepulauan Solomon. Karena ditengah covid yang menyerang, ekonomi global juga terasa sangat terancam karena dampak besarnya. Ditengah tantangan ini, bantuan kesehatan yang dilakukan Tiongkok menjadikan Kepulauan Solomon terus membangun rasa percaya pada Tiongkok akan masa depan mereka dan hubungan antar keduanya akan semakin erat utamanya pasca Covid 19 nantinya.⁶⁷

Serangkaian realisasi kerjasama komprehensif dalam hubungan diplomatik baru antara Pemerintah Kepulauan Solomon-Tiongkok tidak serta

Supplies".diakses pada In <https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252588.shtml> tanggal 15 Juli 2024

⁶⁷ CIDCA (2021)Solomon Islands Receives Chinas sinophams COVID-19 Vaccines, diakses pada http://en.cidca.gov.cn/2021-04/16/c_611936.htm, tanggal 25 September 2024

merta mengakhiri persaingan diplomatik Tiongkok dan Taiwan di Kepulauan Solomon. Kenyataan bahwa Negara-negara Pasifik Selatan memiliki kecenderungan tidak konsisten dalam menentukan afiliasi politik internasionalnya, mendesak Tiongkok dan Taiwan terus bersaing bersaing meningkatkan kontribusinya bagi Kepulauan Solomon dan PICs lainnya. Pihak Taiwan hingga kini masih terhubung dengan Kepulauan Solomon melalui saluran informal.

Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan Pemerintah Taiwan terhadap Pemerintah Provinsi Malaita yang sejak awal menolak keputusan pemerintah pusat di Honiara beralih mendukung Tiongkok. Dalam pernyataannya, Daniel Suidani yang merupakan pemimpin Provinsi Malaita mengecam keputusan pemerintah pusat dengan dalil bahwasanya serangkaian kesepakatan dan bantuan ekonomi Tiongkok hanya akan merugikan pihak Kepulauan Solomon seiring pembengkakkan tingkat hutang luar negeri negara. Lebih lanjut pihaknya menekankan bahwa relasi bersama Tiongkok berpotensi mempengaruhi iklim kebebasan dan praktik demokrasi di Kepulauan Solomon. Pihak Malaita mengancam akan melakukan blockade aktivitas ekonomi dan bisnis Tiongkok bahkan menginisiasi gerakan separatisme apabila aspirasinya tidak diindahkan Pemerintah Kepulauan Solomon.⁶⁸

Sejauh ini koneksi Malaita dan Taiwan masih sebatas pemberian bantuan suplai perangkat medis dan kebutuhan pokok dalam menghadapi krisis pandemi. Akan tetapi keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung langkah

⁶⁸ Hollingsworth, Julia, 2020. "The Pacific Islands Province is Frustrated with China's Presence That it's Pushing for Independence". In <https://edition.cnn.com/2020/09/17/asia/solomon-islands-malaita-intl-hnk-dst/index.html>

Taiwan, menjanjikan suplai bantuan hingga 25 juta USD, berpotensi melahirkan krisis politik mandalam antara pihak Honiara dan Malaita.

Walaupun demikian, Pemerintahan Kepulauan Solomon secara resmi menjalin hubungan dengan Tiongkok dan memiliki pengaruh yang lebih besar. Bantuan-bantuan seperti yang diberikan Tiongkok ketika pandemi terjadi akan mempererat hubungan antara kedua negara tersebut. Kepulauan Solomon sebagai negara di Kawasan Asia Pasifik juga terkenal dengan permasalahan internal antara daerah yang menyebabkan tidak seluruh keputusan Politik Luar Negeri akan memperoleh suara bulat dari seluruh daerah. Dengan demikian, Tiongkok masih diuntungkan karena Taiwan sendiri telah menarik staff diplomatik dan kunjungan pimpinan negara antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon mempertegas hubungan diplomatik kedua negara tersebut.

Keempat, berhubungan dengan relasi kuat Provinsi antara Guangdong dan Guadalcanal, memungkinkan pemerintah dan masyarakat Kepulauan Solomon berinteraksi lebih banyak dengan pihak Tiongkok dibandingkan Taiwan. Penandatanganan MoU antara Provinsi Guangdong yang terletak di Tiongkok dan Guadalcanal, salah satu provinsi di Kepulauan Solomon.⁶⁹ Hubungan tersebut dikenal dengan '*sister province*' yang merupakan salah satu upaya Tiongkok untuk memperkuat hubungan antar kedua negara. MoU tersebut terkait berbagai topik salah satunya adalah tentang bencana terhadap Kepulauan Solomon sebagai terdara di Pasifik Selatan yang merupakan salah

⁶⁹ CNBayArea. 2023. 'Guangdong Establishes Sister-Province Relationship with Guadalcanal Province of Solomon Islands' Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area: diakses di https://www.cnbayarea.org.cn/english/News/content/post_1057659.html pada 30 September 2024.

satu masalah yang dihadapi negara tersebut. Kerja sama tersebut juga mengedepankan kepentingan kedua negara dalam hal ekonomi seperti mendatangkan investor untuk meningkatkan perekonomian negara, sumber daya manusia dan membangun menjalankan komunikasi yang intens dalam berbagai aspek di masa depan.⁷⁰

Upaya tersebut menjadi salah satu aspek yang akan memperkuat hubungan diplomatik antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok, bukan hanya terkait kedua negara secara keseluruhan, namun juga kerja sama antara provinsi negara tersebut. Salah satu alasan Guadalcanal menjadi daerah yang dipilih untuk penandatanganan MoU tersebut adalah disebabkan hubungan baik antara dua provinsi pada tahun 1984. Provinsi Guadalcanal sendiri merupakan salah satu provinsi termiskin di Kepulauan Solomon pada tahun 2013 menurut bank dunia. Dengan adanya kerja sama tersebut, pihak Guadalcanal mengharapkan perubahan terhadap kondisi ekonomi dari provinsi tersebut. Sedangkan untuk Tiongkok, Perdana Menteri Atu menyuarakan bahwa Provinsi Guadalcanal mendukung pemerintah nasional terhadap Prinsip Satu Cina dan BRI. Hal tersebut merupakan statement politik yang berarti mereka tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat dan mendukung kebijakan politik Tiongkok di dunia Internasional.⁷¹

Selain bantuan ekonomi yang sangat besar dari Tiongkok, Masyarakat

⁷⁰ SIBC. 2023. 'Guadalcanal Province Signs MOU with China's Guangdong Province' Solomon Islands Broadcasting Corporation: dapat diakses di <https://www.sibconline.com.sb/guadalcanal-province-signs-mou-with-chinas-guangdong-province/> pada 30 September 2023

⁷¹ Mampioper, Domnggus A. 2024 "Kerja Sama antara Provinsi Guadalcanal Solomon dan Tiongkok sudah terjalin lima tahun" Jubi.Id: diakses di <https://jubi.id/pasifik/2024/kerja-sama-antara-provinsi-guadalcanal-solomon-dan-tiongkok-sudah-terjalin-lima-tahun/> pada 30 September 2024.

Kepulauan Solomon, memiliki ketertarikan berlebih pada Tiongkok karena terdapat *Sister-Province* yang dimiliki oleh Kepulauan Solomon dan Tiongkok. *Sister-Province* yang dimiliki Kepulauan Solomon sangat mempengaruhi citra Tiongkok ditengah Masyarakat Kepulauan Solomon. Masyarakat sudah sangat terbiasa dengan beberapa hal yang identik dengan Tiongkok ditengah bantuan Taiwan yang mereka rasakan selama ini.

Provinsi Guadalcanal memperoleh manfaat dari persahabatan tersebut melalui pertanian dan transportasi, khususnya kapal *GG Venture*. Persahabatan pada saat itu bersifat sementara. Antara tahun 2011 dan tahun 2014, mantan perdana Menteri Guadalcanal, Anthony veke, Kembali menjalin persahabatan atas dasar yang sama. Kemudian pada tahun 2018, Guadalcanal-Guangdong Forum Agreement (GGFA) resmi dengan Provinsi Guangdong. Ia masih menjabat sebagai presiden GGFA saat ini.⁷²

Guadalcanal-Guangdong *Sister Province*, yang dimiliki keduanya memang dalam waktu yang cukup singkat namun dalam perkembangannya lewat *Sister Province* yang dimiliki pilihan peralihan hubungan diplomatik kepulauan Solomon sangat didukung oleh Masyarakat Solomon dengan berbagai alasan tingkat kepercayaannya pada Tiongkok yang sangat besar dan dampaknya pada provinsi Guadalcanal dalam bidang pertanian dan transportasi laut yang dimiliki dipasarkan di Tiongkok.

Dalam Kerjasama *Sister Province* sepanjang 2011-2014 ini, hasil pertanian yang dimiliki Guadalcanal banyak dikirim ke Tiongkok lewat

⁷² Solomon Start (2021) *Guandalcanal Province sign historical sister-relations with Guangdong Province*, diakses pada, tanggal 24 September 2024

transportasi yang dimiliki atas Kerjasama kedua provinsi.⁷³ Selain itu, Tingkat kedatangan turis yang berasal dari Tiongkok semakin meningkat karena dipengaruhi oleh transportasi laut yang berjalan antara kedua negara.

4.2. Dampak Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon ke Tiongkok

a. Kebijakan Kepulauan Solomon Pasca peralihan dari Taiwan

Pada bulan September 2019, ketika Taiwan semakin dekat menuju kemerdekaan, Kepulauan Solomon dan Kiribati di Pasifik memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Tiongkok, sehingga mengurangi mitra internasional Taiwan menjadi hanya 15 negara dan mengubah salah satu Momen. “Keberhasilan” kekuatan Tiongkok di dunia. Pada masa jabatan pertama Tsai Ing-wen (2016-2019), tercatat 7 mitra internasional yang kalah dari Taiwan adalah Sao Tome dan Principe (Desember 2016), Panama (2017), Republik Dominika (Mei 2018, Burkina (2018), El Salvador (Agustus 2018), Kepulauan Solomon (September 2019) dan Kiribati (September 2019). Menarik diri dari 4 dari 14 negara Pasifik yang memelihara hubungan diplomatik formal dengan Taiwan.⁷⁴

Pertama, prioritas Taiwan dalam bentuk infrastruktur skala kecil dan menengah. Taiwan fokus pada pelatihan sumber daya manusia (SDM) lokal serta peningkatan dan pengembangan ekosistem lokal. Sedangkan Tiongkok secara aktif mengembangkan dan merenovasi infrastruktur besar. Kebijakan luar negeri Taiwan yang mengarah pada perlindungan

⁷³ *Ibid. Solomon Star*

⁷⁴ *Politic Geography Now*, 2019. “Map: Which Countries “Recognize” Taiwan in 2019?”, 23 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [<https://www.polgeonow.com/2018/07/map-which-countries-recog-nize-taiwan.html>] (Diakses [27 Februari 2020]).

iklim dan keamanan nasional adalah pemanfaatan pertanian cerdas melalui kerangka ICDF (*Taiwan International Cooperation and Development Fund*) Taiwan. Disisi lain, saat ini, Tiongkok telah memperkenalkan kebijakan BRI ke Kepulauan Solomon, yang mencakup 2 tujuan utama pembangunan skala besar dan investasi hijau, yang sangat berbeda dengan strategi pembangunan Taiwan. Investasi ramah lingkungan adalah kebijakan Tiongkok yang berfokus pada ekonomi hijau dan pengembangan industri serta kelestarian lingkungan. Investasi ramah lingkungan, yang dituangkan dalam Inisiatif Investasi Hijau untuk Belt and Road, bertujuan untuk mencapai kelestarian lingkungan, kelestarian iklim, dan inklusi sosial sejalan dengan Perjanjian Paris dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB tahun 2020⁷⁵.

Kedua, Tiongkok telah fokus pada kegiatan keuangan dan komersial bahkan sebelum meresmikan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon. Taiwan memiliki sedikit keterlibatan ekonomi atau keuangan dengan Kepulauan Solomon, dibandingkan dengan Tiongkok, di mana perdagangan bilateral menyumbang 2/3 PDB Kepulauan Solomon (\$554,8 juta). Tiongkok akan menjadi mitra dagang utama bagi Kepulauan Solomon, dengan kayu sebagai komoditas prioritas⁷⁶.

Setelah terjalin hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon, Tiongkok menjadi salah satu negara yang

⁷⁵ Smith, G., 2019. "The wisdom of Solomons: Taiwan and China's Pacific power play", Lowy Institute, 12 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/wisdom-solo-mons-taiwan-and-china-s-pacificpower-play] diakses pada 04 Oktober 2024

⁷⁶ Ibid

berpengaruh secara keuangan dan komersil di Kepulauan Solomon. Hal tersebut memperkuat pengaruh Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar negara-negara pasifik⁷⁷. Arah kebijakan ekonomi oleh Kepulauan Solomon tersebut akan sangat berdampak pada posisi Tiongkok di Asia Pasifik. Kepulauan Solomon sendiri secara tradisional dekat dengan Australia dan Amerika Serikat yang juga sebelumnya memberikan suntikan dana kepada Kepulauan Solomon. Sehingga Hubungan Tiongkok dan Kepulauan Solomon yang semakin dekat akan membawa ‘ancaman’ bagi Australia dan Amerika Serikat secara kedudukan di Kepulauan Solomon⁷⁸.

Hal tersebut dapat dilihat dengan pertemuan antara Kepala Negara yaitu Perdana Menteri Kepulauan Solomon yakni Jeremah Manele dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dari pertemuan tersebut diputuskan bahwa Tiongkok akan memberikan suntikan dana kepada Kepulauan Solomon sebesar \$20 juta dolar. Disebabkan hal itu, Kepulauan Solomon menyebut Tiongkok sebagai ‘transformatif’ yang semakin membuat negara tersebut semakin aktif menyuarakan dukungannya terhadap Kepulauan Solomon dalam kebijakan politik luar negeri Kepulauan Solomon.

Ketiga, bahasa Mandarin mengedepankan upaya diplomasi melalui pendidikan berupa Sekolah Chang Wah di Honolulu, ibu kota Kepulauan

⁷⁷ Antara news (2023) ‘CGTN: China, Kepulauan Solomon jalin kemitraan komprehensif dan strategis demi meningkatkan hubungan kedua negara’ Antara news: dapat diakses di <https://www.antaranews.com/berita/3632814/cgtn-china-kepulauan-solomon-jalin-kemitraan-komprehensif-dan-strategis-demi-meningkatkan-hubungan-kedua-negara> pada 05 Oktober 2024.

⁷⁸ Voa Indonesia (2024) ‘China Gelontorkan \$20 Juta untuk Kepulauan Solomon’ VOA Indonesia: dapat diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/china-gelontorkan-20-juta-untuk-kepulauan-solomon/7700132.html> pada 05 Oktober 2024.

Solomon. Hal tersebut dilakukan oleh diaspora Tiongkok di Kepulauan Solomon untuk melakukan diplomasi pendidikan sekaligus menyebarkan pengajaran budaya dan gaya mengajar Tionghoa masih dilakukan di sekolah. Pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok memberikan dukungan finansial yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap kebijakan pendidikan di Kepulauan Solomon tersebut. Taiwan sendiri tidak berfokus pada kualifikasi melalui pendidikan dan pembangunan.⁷⁹

Dalam hal ini, setelah peralihan dari Taiwan ke Tiongkok, segala aspek seperti pendidikan dan penyebaran budaya menjadi salah satu langkah Tiongkok untuk menyebarkan pengaruhnya tidak hanya berupa bantuan material seperti ekonomi dan keamanan, namun juga terkait dengan bidang lain seperti penyebaran budaya dan bahasa Tiongkok di Kepulauan Solomon. Tiongkok juga memberikan bantuan beasiswa terhadap warga negara Kepulauan Solomon yang belajar negara mereka. Beasiswa tersebut diberikan dengan syarat mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diharuskan mengikuti kelas bahasa mandarin dan lulus dari kelas tersebut. Duta Besar Kepulauan Solomon Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Barret Salato merupakan perantara mahasiswa dan Pemerintah Tiongkok untuk menyalurkan bantuan beasiswa mengucapkan terima kasih secara resmi. Dalam hal ini, pemerintah Kepulauan Solomon mendukung penuh diplomasi pendidikan

⁷⁹ Solomon Times, 2019. "Statement by the Prime Minister Hon. Manasseh Sogavare on Switch to China, transkrip", 20 September 2019, [daring] Tersedia dalam [<https://www.solomontimes.com/news/statement-by-the-prime-minister-hon-manasseh-sogavareon-switch-to-chi-na/9362>] diakses pada 04 Oktober 2024

dan bahasa yang dilkauan oleh Tiongkok⁸⁰.

b. Memperkuat pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik

Pertama, Tiongkok berupaya terus menerus memperkuat pengaruhnya di Seluruh dunia tidak hanya menonjolkan kekuatan Angkatan lautnya atau dengan membuat pulau-pulau palsu di laut Tiongkok Selatan tetapi juga kekuatan ekonomi melalui kegiatan perdagangan, dan sekarang Tiongkok membentuk bank baru yang disebut *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Adapun tujuan dari pembentukan AIIB ini adalah untuk mendukung konektivitas, integritas dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan dan untuk meningkatkan daya saing di negara-negara Asia. Adapun tujuan lainnya adalah untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat di penuhi oleh bank multilateral lainnya. Dan bank tersebut mulai beroperasi pada tahun 2015.⁸¹

Resensi terhadap pembentukan bank baru tersebut muncul dari Amerika Serikat (AS). Pembentukan AIIB ini tidak terlepas bagi kepentingan Tiongkok dalam persaingan politik internasional. Pendirian AIIB sangat erat kaitannya dengan geopolitis dan dianggap sebagai soft power Tiongkok untuk menyaingi hegemoni AS yang selama ini didukung lewat bank dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan itu, Amerika Serikat mendesak negara-negara sekutu tradisionalnya di Eropa,

⁸⁰ Mampioer, Dominggus A (2024) 'Dewan Bisnis Tiongkok Kepulauan Solomon Membantu Mahasiswa Solomon di Beijing' JubiId: dapat diakses di <https://jubi.id/pasifik/2024/dewan-bisnis-tiongkok-kepulauan-solomon-membantu-mahasiswa-solomon-di-beijing/> pada 06 Oktober 2024

⁸¹ Humprey Wangke (2015). Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIIB. *Jurnal Hubungan Internasional*: Vol. VII, No 07 hal 5-8.

Jepang, Korea Selatan, dan Australia untuk tidak bergabung ke dalam AIIB. AS khawatir bahwa AIIB dibentuk Tiongkok untuk menyaingi bank dunia dan bank Pembangunan Asia yang selama ini dikuasainya.⁸²

Perdebatan AS dan Tiongkok mengenai pendirian AIIB merupakan cerminan dari persaingan antara dua negara terkaya di dunia saat ini untuk memperebutkan pengaruh di Kawasan Asia Pasifik. AS sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia mencurigai pembentukan AIIB sebagai Upaya Tiongkok mengambil alih peran bank dunia dan bank Pembangunan Asia atau *Asia Development bank* (ADB) di Kawasan Asia Pasifik. AIIB dicurigai sebagai Upaya Tiongkok untuk menyebar luaskan *soft power* yang dimilikinya di Kawasan Asia Pasifik. Tiongkok berargumen bahwa pembentukan AIIB adalah dalam rangka percepatan perwujudan konsep jalur sutera bahkan mereka akan belajar dari bank dunia dan ADB dalam membangun AIIB. Sejak dibentuk pada tahun 2013, AIIB berhasil menarik lebih dari 20 negara Asia untuk bergabung, termasuk negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik.⁸³

Dalam hal ini, disebabkan oleh keberpihakan Kepulauan Solomon terhadap Tiongkok, maka dalam Kebijakan Luar Negeri ataupun dalam hal-hal yang menguntungkan Tiongkok, maka Kepulauan Solomon akan berada di posisi untuk mendukung Tiongkok. Oleh sebab itu, bantuan besar-besaran yang diberikan Tiongkok terhadap Kepulauan Solomon secara tidak langsung memberikan tekanan politik terhadap Tiongkok

⁸² Humprey Wangke (2015). Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIIB. *Jurnal Hubungan Internasional*: Vol. VII, No 07 hal 5-8.

⁸³ Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*.

yang akan berdampak pada visi Tiongkok dalam memperkuat hegemoninya di berbagai belahan dunia.

Kedua, salah satu yang menandai kekuatan sebuah negara di Kepulauan Pasifik adalah kekuatan militer. Dalam hal ini, Tiongkok melakukan kerja sama militer dengan Kepulauan Solomon. Perjanjian keamanan antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok pada bulan April 2022 itu sangat berdampak besar pada geopolitik negara-negara Kepulauan Pasifik dan Oceania. Pengaturan keamanan bilateral ini merupakan konsesi pertama Komunis Tiongkok di kawasan ini, yang memungkinkan Beijing mengerahkan pasukan Tiongkok di dekat jalur pelayaran utama, hanya 1.200 mil dari Australia. Keterlibatan Tiongkok dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan ilegal (IUU) di kawasan menjadikan perjanjian ini semakin penting. Perjanjian keamanan menunjukkan bahwa Kepulauan Solomon dapat menerima bantuan dari Tiongkok, termasuk polisi, militer, dan penegak hukum lainnya, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai pangkalan militer Tiongkok di pulau-pulau strategis.⁸⁴

Dampaknya telah menimbulkan kekhawatiran serius di Pasifik. Perlu dicatat bahwa Kepulauan Solomon mengubah identitasnya dari Taiwan menjadi Tiongkok setelah investasi besar-besaran Tiongkok, karena empat dari 14 negara yang tersisa mengakui Taiwan di Pasifik Selatan, termasuk Tuvalu, Kepulauan Marshall, Palau, dan Nauru.

⁸⁴ Daniel Hurst, "Perjanjian keamanan dengan China 'diparaf' oleh kedua negara, kata Kepulauan Solomon," *The Guardian*, 31 Maret 2022, <https://www.theguardian.com/>.

Menanggapi tindakan Tiongkok, negara-negara lawan bertindak cepat.

Perjanjian keamanan ini akan memungkinkan Tiongkok untuk memperluas kehadiran angkatan laut strategisnya di Pasifik untuk pertama kalinya, dan berpotensi membangun pangkalan militer kedua di luar negeri setelah Djibouti. Perjanjian tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap kekuatan teritorial, ekonomi, dan militer Tiongkok, sekaligus memberikan fleksibilitas melalui perjanjian serupa dengan negara kepulauan Pasifik lainnya. Salah satu tujuan utama Tiongkok adalah mendobrak penghalang laut di rangkaian pulau guna mendapatkan lebih banyak akses ke Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Meskipun belum ada kesepakatan akhir yang dicapai mengenai pangkalan angkatan laut Tiongkok di Kepulauan Solomon, pembangunan tersebut merupakan langkah terbesar Tiongkok ke kawasan Pasifik sejak pergantian milenium.⁸⁵

⁸⁵ “Rekap Pertemuan Tingkat Menteri Mitra di Blue Pacific (PBP)” (transkrip pengarahannya, Departemen Luar Negeri AS, 22 September 2022), <https://www.state.gov/>.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tiongkok memiliki sejarah panjang terkait dengan kedaulatan kedua negara. Disebabkan oleh hal tersebut, negara lain yang menjalin hubungan diplomatik dengan salah satu negara tersebut berdampak pada hubungan yang memburuk negara lainnya. Oleh sebab itu, hubungan diplomatik yang dilakukan Tiongkok dan Kepulauan Solomon pada tahun 2019 menyebabkan Taiwan menarik perwakilan diplomatik negaranya dari Kepulauan Solomon.

Adapun peralihan hubungan diplomatik tersebut disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut:

1. Tiongkok merupakan partner perdagangan utama Kepulauan Solomon.
2. Tiongkok memberikan dukungan dana bantuan dan investasi yang besar kepada Solomon.
3. Pihak Tiongkok juga terlihat berpartisipasi aktif dalam menyuplai kebutuhan material Kepulauan Solomon di masa pandemi Covid 19.
4. Hubungan dengan relasi kuat Provinsi antara Guangdong dan Guadalcanal.

Peralihan hubungan diplomatik tersebut tentu akan memberikan dampak kepada negara-negara yang terlibat didalamnya. Berikut adalah dampak dari peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dari yang awalnya Taiwan ke Tiongkok:

1. Perubahan kebijakan Kepulauan Solomon Pasca peralihan dari Taiwan yang meliputi: *Pertama*, Tiongkok secara aktif mengembangkan dan merenovasi infrastruktur besar di Kepulauan Solomon. *Kedua*, Tiongkok

telah fokus pada kegiatan keuangan dan komersial bahkan sebelum meresmikan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon. *Ketiga*, bahasa Mandarin mengedepankan upaya diplomasi Tiongkok melalui pendidikan.

2. Memperkuat pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik. *Pertama*, Tiongkok berupaya terus menerus memperkuat pengaruhnya di Seluruh dunia tidak hanya menonjolkan kekuatan Angkatan lautnya atau dengan membuat pulau-pulau palsu di laut Tiongkok Selatan tetapi juga kekuatan ekonomi melalui kegiatan perdagangan, dan sekarang Tiongkok membentuk bank baru yang disebut Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang juga berdampak pada pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. *Kedua*, salah satu yang menandai kekuatan sebuah negara di Kepulauan Pasifik adalah kekuatan militer. Dalam hal ini, Tiongkok melakukan kerja sama militer dengan Kepulauan Solomon.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang diperoleh dari hasil riset dengan membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti kemudian ingin memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Soomon dari Taiwan ke Tiongkok. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bersumber dari berbagai bahan bacaan, untuk itu bagi peneliti selanjutnya diharap dapat melakukan penelitian secara lebih

mendalam dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang dapat mendukung data dan argumentasi dalam penelitian.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pisau analisis yang lebih signifikan sehingga dapat membahas topik terkait peralihan hubungan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aqorau, Transform, 2021. "Solomon Islands Foreign Policy Dilemma and The Switch from Taiwan to China", *The China Alternative*. Australia: ANU Press.
- Breuning, Marijke.(2007). *Foregin Policy Analysis: A Comparative Introduction*, New york: Palgrave Macmillan.
- Holsti, 1992. Politik Internasioanal: Suatu Kerangka Analisis. Dalam DR.A.A Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasioanal*. (Bandung, PT .Remaja Rosda Karya)
- Holsti, (2006). *Making America Foreign-Policy* New York:Routledge.
- Holsti. KJ, 1987, *Politik Internasional Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta.
- Holsti. KJ. (1995). *Internasional Politics: Framework of Analysis*. London: *Prentice Hall Internasional*.
- Holsti dan Jervis. (2005), *American Foreign Policy*, New York Routledge.
- Jack C Plano dan Roy Olton, dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani (2005) *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Routledge. Holsti, dan Jervis. (2005). *American Foreign-Policy*, New York Routledge. James N. Rosenau et al., *World Politics: An Introduction*, (New York: *The Free Pres 1976*) ,18.
- Sahir, S.H. (2021) *Metode Penelitian*, Medan : KBM Indonesia
- Syafrida Hafni Sahir (2021) "Metodologi penelitian" KBM INDONESIA: Medan.
- Perwita & Yani. (2005). *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda.
- Plano, J dan Olton, R. 2015, dalam DR.A.A Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya. Hal 49.
- Wiratama, K. A., Priadarsini, N. W. R., & Suwecawangsa, A. P. Faktor Pendorong Kepulauan Solomon Menyepakati Kerja Sama Belt And Road Initiative (Bri) Dengan Tiongkok Pada Tahun

Jurnal

- Arry Bainus & Junita Budi Rachman, Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Volume 2, No. 2 *Journal of Internasional Studies*, 2018 (109-115).
- Alfi, Raihan dkk. (2023). Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara. *Jurnal Transborders: Vol. 7 (1)* hal 1-14.
- Dugis (2007) *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Halaman 20 Vol 2.
- Humprey Wangke (2015). Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIIB. *Jurnal Hubungan Internasional: Vol. VII, No 07* hal 5-8.
- Katong Ragawi Numadi (2023) *Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Island dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019*, *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Bali Internasional Vol 16 (2)*.
- Nadjiha, Siti (2020). Persaingan Cina Australia dalam Perebutan Pengaruh di Kawasan Asi Pasifik. *Jurnal Asia Pasific Studies: vol. 4 (1)* hal 33-45.
- Numadi, K. R. (2023). *Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019*. *Jurnal Hubungan Internasional, 16(2)*.
- Oktavia, Kinanti dkk (2023) Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian setiap Negara Menggunakan Python. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan: Vol 9 (20)* hal 425-436.
- Putri, Adinda Normala (2020). Persaingan Pengaruh di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Tiongkok. *Jurnal Asia Pasifik Studies: Vol. 3 (2)* hal 130-144.
- Putri, A. N. (2019). Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok. *Jurnal Asia Pacific Studies, 3(2)*, 130-144.

Skripsi

- Aqorau, Transform. 2021. *Solomon Islands' Foreign Policy Dilemma and the Switch from Taiwan to China in The China alternative: changing regional order in the Pacific Islands*, by Graeme Smith and Terence Wesley-Smith (eds). Canberra: Australian National University Press

Charilia Riantanti Pramitha, Skripsi : *Bantuan Official Development Assistance (ODA) Tiongkok sebagai Penyebab Peralihan Pengakuan Diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok oleh Kepulauan Solomon dan Kiribati*". Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.

Chevalier, Christopher. 2022. *Understanding 'Solo': A biography of Solomon Mamaloni*. Canberra: Australian National University.

Lestari, Bunga. 2022. *Upaya Tiongkok dalam Mengalihkan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon*. Padang: Universitas Andalas.

Santoso, V. A., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2021). *Kompetisi Diplomasi: Taiwan (ROC) versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon tahun 2016- 2019/10/HI/2021* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science).

Spicah Virginia Tatiwakeng (2018) "*Kebijakan Luar Negeri Presiden Duterte Dan pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Filipina-Amerika Serikat*" Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana. Tatiwakeng, S. V. (2018). *Kebijakan Luar Negeri Presiden Duterte dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Bilateral Filipina-Amerika Serikat* (Doctoral dissertation, Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW).

Victoria Amandani Santoso (2021) "*Kompetisi Diplomasi : Taiwan (ROC) Versus Tiongkok (PRC) di Kepulauan Solomon Tahun 2016-2019*" Semarang: Universitas Diponegoro.

Wiratama, Kadek Andhika, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and Adi Putra Suwecawangsa. "Faktor Pendorong Kepulauan Solomon Menyepakati Kerja Sama Belt And Road Initiative (BRI) Dengan Tiongkok Pada Tahun."

Website

Antara news (2023) 'CGTN: China, Kepulauan Solomon jalin kemitraan komprehensif dan strategis demi meningkatkan hubungan kedua negara' Antara news: dapat diakses di <https://www.antarane.ws.com/berita/3632814/cgtn-china-kepulauan-solomon-jalin-kemitraan-komprehensif-dan-strategis-demi-meningkatkan-hubungan-kedua-negara> pada 05 Oktober 2024.

Batley, James, 2016. "Constituency Development Funds in Solomon Islands". Diakses pada https://dpa.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2016-07/ib2015.67_batley.pdf tanggal 15 Juli 2024.

CIDCA (2021) Solomon Islands Receives Chinas sinophams COVID-19 Vaccines,

diakses pada http://en.cidca.gov.cn/2021-04/16/c_611936.htm, tanggal 25 September 2024

CNBayArea. 2023. 'Guangdong Establishes Sister-Province Relationship with Guadalcanal Province of Solomon Islands' Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area: diakses di https://www.cnbayarea.org.cn/english/News/content/post_1057659.html pada 30 September 2024.

Dapartemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, "*Definisi Kepentingan Nasional*," <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/defining-national-interest>.

Daniel Hurst, "Perjanjian keamanan dengan China 'diparaf' oleh kedua negara, kata Kepulauan Solomon," *The Guardian*, 31 Maret 2022, <https://www.theguardian.com/>.

Elman, Miriam Fendius, 2015. "The Foreign Policy of Small States: Challenging Neorealism in Its Own Backyard" [online]. Diakses pada <http://www.maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Fendius.pdf> tanggal 14 Juli 2024

Global Times, 2022. "Chinese Aircraft Arrived in Solomon Islands with Anti Epidemic Supplies".diakses pada <https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252588.shtml> tanggal 15 Juli 2024

Hollingsworth, Julia, 2020. "The Pacific Islands Province is Frustrated with China's Presence That it's Pushing for Independence". In <https://edition.cnn.com/2020/09/17/asia/solomon-islands-malaita-intl-hnk-dst/index.html>

Karambelkar, Amruta, 2022. "The China-Solomon Islands Bilateral Security Pact". Diakses pada <https://www.vifindia.org/sites/default/files/The-China-Solomon-Islands-Bilateral-Security-Pact.pdf> tanggal 14 Juli

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Cooperation between China and the Pacific Islands Countries. Diakses pada https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html tanggal 14 Juli 2024

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2022. "Eight Pronged Important Consensus Reached by China and Solomon Islands". In https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202205/t20220527_10693484.html tanggal 14 Juli 2024

Mampiooper, Domnggus A. 2024 "Kerja Sama antara Provins Guadalcanal

Solomon dan Tiongkok sudah terjalin lima tahun” Jubi.Id: diakses di <https://jubi.id/pasifik/2024/kerja-sama-antara-provinsi-gualdacanal-solomon-dan-tiongkok-sudah-terjalin-lima-tahun/> pada 30 September 2024.

Natalie Whiting, Christina Zhou, Kai Feng. 2019. ‘What does it take for China to take Taiwan’s Pacific allies? Apparently, \$730 million’ diakses di <https://www.abc.net.au/news/2019-09-18/solomon-islands-cuts-ties-with-taiwan-in-favour-of-china/11524118> pada 30 September 2024.

Nick Sas (2024) Solomon Islands' pro-China leader Manasseh Sogavare withdraws from race to be next prime minister, diakses pada <https://www.abc.net.au/news/2024-04-29/solomon-islands-manasseh-sogavare-to-step-down-as-pm-candidate/103781462> tanggal 12 Juli 2024

OEC (2022) ‘Solomon Island-China’ OEC: dapat diakses di <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slb/partner/chn> pada 4 Oktober 2024.

OEC (2022) Solomon Islands-China Bilateral, diakses pada <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slb/partner/chn>, tanggal 24 September 2024.

Politic Geography Now, 2019. “Map: Which Countries “Recognize” Taiwan in 2019?”, 23 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [<https://www.polgeonow.com/2018/07/map-which-countries-recognize-taiwan.html>] Dikses pada 4 Oktober 2024.

“Rekap Pertemuan Tingkat Menteri Mitra di Blue Pacific (PBP)” (transkrip pengarahan, Departemen Luar Negeri AS, 22 September 2022), <https://www.state.gov/> .

SIBC. 2023. ‘Guadalcanal Province Signs MOU with China’s Guangdong Province’ Solomon Islands Broadcasting Corporation: dapat diakses di <https://www.sibconline.com.sb/guadalcanal-province-signs-mou-with-chinas-guangdong-province/> pada 30 September 2023

Solomon Times, 2019. “Statement by the Prime Minister Hon. Manasseh Sogavare on Switch to China, transkrip”, 20 September 2019, [daring] Tersedia dalam [<https://www.solomontimes.com/news/statement-by-the-prime-minister-hon-manasseh-sogavareon-switch-to-china/9362>] diakses pada 04 Oktober 2024

Solomon Start (2021) *Guandalcanal Province sign historical sister-relations with Guangdong Province*, diakses pada, tanggal 24 September 2024

Solomon Islands Government, 2020. “PRC Hands 2,5 million USD in Cash to

Fight Covid-19”. Diakses pada <https://solomons.gov.sb/prc-hands2-5m-in-cash-grant-to-fight-covid-19/> tanggal 15 Juli 2024

Smith, G., 2019. “The wisdom of Solomons: Taiwan and China’s Pacific power play”, Lowy Institute, 12 September 2019, [daring]. Tersedia dalam [<https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/wisdom-solo-mons-taiwan-and-china-s-pacificpower-play>] diakses pada 04 Oktober 2024

Trading Economi (2024) ‘China Export to Solomon Islands’ Trading Economic: dapat diakses di <https://tradingeconomics.com/china/exports/solomon-islands> pada 04 Oktober 2024.

UN WOMEN ,“Pulau Solomon”,https://asiapacific-unwomen-org.translate.goog/en/countries/fiji/co/solomonislands?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#1_anc. Diakses pada 20 Maret 2024.

VOA Indonesia (2024) “China Gelontorkan \$20 Juta untuk Kepulauan Solomon” VOA Indonesia: dapat diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/china-gelontorkan-20-juta-untuk-kepulauan-solomon/7700132.html> pada 1 Oktober 2024

World Bank (2022) International Debt Statistics 2022, diakses pada <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/2d6b3d72-a763-5db8-bd8b-209a6a7fb384/content> tanggal 24 September 2024.

Zhang, Denghua, 2019. “*Comparing China and Taiwan Aid to Pacific*”. Di akses pada https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/186125/1/ib_2019_20_zhang_final.pdf tanggal 14 Juli 2024

Zhang, D. (2021). *China–Pacific Tourism Engagement: Opportunities and Challenges*.

